



# **PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI MEDIA MASSA**

## **Panduan Bagi Jurnalis**

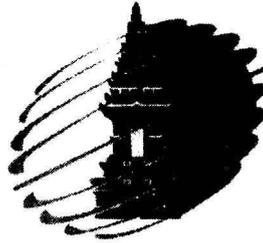
### **MODUL 5**

Oleh :  
**Prof. Dr. M. Budiayatna, dkk.**

Direktorat  
Kebudayaan

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
2004**

374  
16N  
P



**PEMBENTUKAN  
KARAKTER BANGSA  
MELALUI MEDIA MASSA  
Panduan Bagi Jurnalis  
MODUL 5**

Disusun oleh :

Penanggung Jawab : Prof. Dr. M. Budyatna.

Ketua Peneliti : Dr. Ibnu Hamad, MSi

Anggota : Drs. Fajar Iqbal

Khairullah, Sag.MSi

Dra. Soraya, MSi

Drs. Zulham, MSi

M. Nuryazidi

Desti Arya Kuntarti

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
2004**

**PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI  
MEDIA MASSA UNTUK PANDUAN BAGI JURNALIS**

**TIM PENYUSUN**

TIM DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEBUDAYAAN

**PENERBIT**

PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA  
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

**GAMBAR SAMPUL**

CANDI BENTAR

**HAK CIPTA**

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ISBN 979-99131-7-9

## **Kata Pengantar**

Apa jadinya jika sebuah bangsa kehilangan karakter dirinya? Tentulah bangsa itu bukan hanya tidak dihargai oleh bangsa-bangsa lain, tetapi juga oleh warganya sendiri. Para warga bangsa itu akan kehilangan tata-krama dalam pergaulan sosial baik antara sesamanya maupun dengan orang-orang dari bangsa lain.

Kenyataannya karakter bangsa Indonesia sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Adat istiadat, sopan santun, hukum dan peraturan banyak dilanggar. Perilaku menyimpang seperti kekerasan, pornografi, mistik, dan korupsi, merebak di tengah masyarakat. Bangsa kita sedang mengalami dekadensi moral dan disorientasi tentang masa depannya.

Media massa merupakan pihak yang ikut bertanggung jawab atas turunnya karakter dan pekerti bangsa. Isi media yang banyak mengumbar kekerasan, pornografi, dan mistik ditengerai ikut menyumbang pada kerusakan moral bangsa. Ideologi kapitalisme yang merasuk media telah menyebabkan media kehilangan fungsi sosialnya ketimbang kepentingan bisnisnya.

Padahal kemajuan sebuah bangsa, tak terkecuali bangsa kita, banyak bergantung pada karakter dan pekertinya. Yaitu karakter dan pekerti bangsa yang bersifat memajukan bangsa, berupa ethos kerja yang tinggi. Disamping mesti memiliki kelemahan lembut, karakter yang diperlukan untuk memajukan bangsa adalah semangat untuk cepat bangkit dari keruntuhan, rajin bekerja, jujur, terus terang, tidak

pendendam, selalu melihat ke masa depan, tahu cara memperbaiki diri, mencari rejeki halal, sikap dan mental yang bersih, dan cenderung pada kebaikan.

Oleh karena itu, media perlu mendapat perhatian dalam rangka pembentukan karakter dan pekerti bangsa. Fungsi pendidikan media harus ditonjolkan supaya dapat mengimbangi fungsi bisnisnya. Sebab media sanggup menimbulkan efek yang kuat di tengah masyarakat; isinya dapat ditiru oleh khalayak.

Kajian ini merupakan bagian dari usaha menciptakan karakter dan pekerti bangsa Indonesia. Bertitik tolak dari pendapat para ahli yang dihimpun untuk kajian ini, mau tak mau media harus mengikuti etika dan peraturan dalam bidang yang berlaku. Kalangan media mesti memikirkan hal yang terbaik untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat.

Dengan adanya kajian seperti ini orang media berbicara tentang tanggung jawab media diharapkan dapat merangsang para praktisi media untuk terus menerus turut serta dalam mengembangkan karakter dan pekerti bangsa kita. Semoga kajian ini semakin menyadarkan kalangan media akan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan bangsa. (\*).

Penyusun

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Permasalahan Kajian .....	4
I.3 Tujuan Kajian .....	4
I.4 Metode Kajian .....	4
I.5 Out put Kajian .....	5
<b>Bab II Kerangka Teori .....</b>	<b>6</b>
II.1 Fungsi dan Disfungsi Sosial Media Massa .....	6
II.2 Etika Media Massa .....	9
<b>Bab III Hasil Kajian .....</b>	<b>22</b>
III.1 Realitas Karakter dan Pekerti Bangsa dalam Pandangan Orang Media .....	22
III.2 Karakter dan Pekerti Bangsa: Perkembangan dan Faktor ktor Penyebabnya .....	32
III.3 Peranan Media dalam Pembentukan Karakter Bangsa .....	47

III.4 Tanggung Jawab Media Dalam Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa .....	53
<b>Bab IV Interpretasi dan Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
IV.1 Interpretasi .....	67
A. Karakter dan Pekerti Bangsa: Bukan Sekadar Sopan Santun .....	67
B. Lintas Batas Karakter dan Pekerti Bangsa: Pengaruh Global Terhadap Perkembangan Karakter dan Pekerti Bangsa .....	70
C. Media dan Pembentukan Karakter dan Pekerti Bangsa: .....	72
Disfungsinya Lebih Terlihat daripada Fungsinya	
D. Tanggung Jawab Media dalam Pembentukan Karakter dan Pekerti Bangsa: Cenderung Komunitarian tetapi Ingin Tetap Bebas .....	75
IV.2 Kesimpulan .....	81
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Salah satu masalah psikososial yang besar dalam era reformasi ialah munculnya krisis budaya; yaitu terjadinya krisis pola-pikir (*mindset*<sup>1</sup>) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pola pikir masyarakat kita menjadi kabur dan atau terdistorsi tentang bagaimana hidup sebagai warga negara Indonesia dan berkarakter sebagai orang Indonesia.

Sebagai warga negara, setiap orang idealnya mempunyai pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh konstitusi, setiap warga negara bukan hanya berhak mendapatkan pengakuan akan keberadaannya di negara ini, memilik hak hidup di tanah airnya sendiri, serta mendapatkan perlindungan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan di tanah airnya. Lebih dari itu, ia juga wajib menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sesama bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup> *Mindset* dalam *Webster's Encyclopedic Unabridge Dictionary of the English Language* (New York: Gramersy Books, 1996) Secara umum dapat diartikan sebagai sikap, pengerahan, kesadaran tentang kekuatan atau kemampuan intelektual, ataupun suatu cara berpikir, perasaan, pendapat, atau cara pandang. Dalam tulisan ini digunakan istilah "pola pikir", yang di dalamnya terkandung pula arahan, cara pandang, cara berpikir, dan perasaan yang terkait dengannya.

Tetapi jika kita melihat kecenderungan umum perilaku sosial masyarakat kita muncul pertanyaan tentang bangsa Indonesia: Akan kita jadikan seperti apa bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia masih memiliki jati diri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat bertentangan dengan keinginan kita menjadi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, dan beradab dengan harkat martabat tinggi, tidak rendah diri sehingga mampu setara dengan bangsa lain di dalam pergaulan internasional.

Oleh karena itu proses pendidikan karakter bangsa dan pekerti bangsa perlu kita lakukan supaya membuat bangsa Indonesia tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan yang makin lama makin kompleks dan rumit. Tujuan utama dari proses ini adalah agar bangsa Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri.

Pendidikan karakter dan pekerti bangsa ini makin terasa urgensi dan pentingnya ketika kita melihat kenyataan bahwa paling sedikit sejak enam tahun terakhir kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menurun secara drastis kualitasnya. Potensi dan kenyataan disintegrasi serta keterpurukan bangsa dan bernegara berlangsung di depan mata kita. Menanggapi kenyataan seperti itu, sebagian orang Indonesia, termasuk kaum terpelajarnya pun sampai melontarkan kata-kata "Saya malu menjadi orang Indonesia". Dalam kehidupan sehari-hari, konsumerisme mendorong si kaya hidup boros, konsumtif, dan hedon. Celakanya, hal itu ditiru pula oleh si miskin dengan segala biaya yang harus dipikulnya dan diperoleh

secara susah payah, termasuk mungkin pula dengan cara yang tidak halal.

Indikasi lain semakin turunnya kualitas kebangsaan kita tampak dari aset negara dan sarana umum sering dirusak, disiplin yang sangat longgar, berbagai aturan mulai dari aturan lalu lintas hingga peraturan perundangan yang dilanggar tanpa adanya rasa malu dan bersalah, pewajaran dari pihak masyarakat terhadap suatu penyimpangan yang semakin marak, pelecehan dan penganiayaan keji terjadi hampir tiap hari di depan mata.

Demikian pula sensor terhadap tayangan dan siaran yang merusak nilai-nilai moral oleh media sangat lemah. Di berbagai pelosok tanah air, keamanan tidak terjamin karena maraknya premanisme. Sementara itu, muncul pula kekejaman yang menyolok di dunia pendidikan (kasus STPDN, tawuran pelajar, dan lain-lain) yang semula tak terbayangkan akan terjadi di dunia pendidikan. Hal yang lebih parah, akhlak dari warga negara (orang dewasa pria dan wanita dengan berbagai profesi dan anak-anak) menurun akibat kejahatan yang ditimbulkan dari dunia narkoba.

Akibat semua itu adalah terjadinya kekacauan pada setiap level sistem kehidupan mulai dari rumah tangga, dunia pendidikan, dunia birokrasi, dan sebagainya. Tak terkecuali kekacauan juga menjangkiti media massa, sebuah lembaga sosial yang seharusnya menjadi agen perubahan yang baik. Kenyataannya sajian materi di berbagai media kurang mendukung tercapainya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh dan bermartabat tinggi. Media belum sepenuhnya

mengajarkan masyarakat tentang prinsip mutualisme sebagai sarana mencapai kekuatan dan kemajuan bangsa. Sedangkan salah satu unsur penting untuk membangun karakter dan pekerti bangsa di dalam bangsa yang pluralistik adalah prinsip mutualisme tersebut sebagai sumber kekuatan untuk maju.

## **I.2 Permasalahan Kajian**

Berdasarkan latar belakang di atas, terutama yang berkaitan dengan sejumlah sajian media yang mempertontonkan kekerasan fisik maupun non-fisik, pornografi dan pornoaksi, tontotan yang menjual mimpi, tulisan atau gambar yang merusak moral, dan lain sebagainya, maka yang menjadi fokus kajian adalah:

- Se jauh mana peranan media terhadap pembentukan karakter dan pekerti bangsa ?
- Tanggung jawab apa yang bisa diberikan oleh media massa dalam pembentukan karakter dan pekerti bangsa?

## **I.3 Tujuan Kajian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun pendapat dari berbagai ahli dan praktisi tentang peranan media massa dalam membentuk karakter dan pekerti bangsa.

## **I.4 Metode Kajian**

Guna penyusunan laporan kajian digunakan dua metode. Pertama, adalah wawancara mendalam dengan para ahli dan praktisi

di bidang komunikasi. Untuk kajian ini telah diwawancarai 14 orang pakar dan praktisi bidang jurnalistik media cetak (Budiarto Sambazy dari *Kompas*), radio (Indra Bigwanto dari PRSSNI), TV (Satrio Arismunandar dari *TransTV*, Syaiful Rahman dari IJTI), media on-line (Budiono Darsono dari *DetikCom*), produser film (Slamet Rahardjo Djarot), praktisi periklan (Jenny Hardjono), penerbit buku (Haidar Baqir dari MIZAN), LSM Media (Bejo Untung dari LSPP, Stanley dari ISAI, Abdullah Alamudi dari LPDS), institusi publik mengenai media (Heru Purwanto dari ANTARA, Sinansari S ecip dari KPI, Lukas Suwarso dari Dewan Pers).

Kedua, adalah melalui kajian pustaka (literatur), terutama bahan-bahan yang berkenaan dengan fungsi media di tengah masyarakat dan masalah etika media.

### **1.5 Hasil (Out Put) Kajian**

Out put dari kajian ini akan digunakan sebagai masukan bagi penyusunan modul Pendidikan Pekerti dan Karakter Bangsa melalui media massa. Dengan mensistемasikan pendapat para pakar dan praktisi tersebut dapat diketahui benang merah peranan dan tanggung jawab sosial media dalam mengembangkan karakter dan pekerti bangsa. Dari usaha mengkategorisasikan pendapat para pakar dan praktisi tersebut, dapat pula diketahui kecenderungan sikapnya masing-masing mengenai strategi pendidikan karakter dan pekerti bangsa.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### II.1 Fungsi dan Disfungsi Sosial Media Massa

Fungsi sosial media yang sudah lama dikenal di tengah masyarakat ada empat<sup>1</sup>, yaitu: (1) pengawasan lingkungan, (2) korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, (3) transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan (4) hiburan.

Keempat fungsi sosial media yang ditelorkan oleh Harold D. Lasswell (1948) tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Denis M. Quail (1983) sebagai berikut<sup>2</sup>:

##### A. Informasi

- menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
- Menunjukkan hubungan kekuasaan.
- Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

##### B. Korelasi

- menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
- menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.

---

<sup>1</sup> Wright, Charles R, *Mass Communication A Sociological Perspective*, (third edition), McGraw Hill, 1986, hal. 4-5.

<sup>2</sup> McQuail, Denis, *Mass Communication Theory, An Introduction* (second edition). Sage Publication, 1987, hal. 71.

- melakukan sosialisasi.
- mengkoordinasikan beberapa kegiatan.
- membentuk kesepakatan.
- menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif.

#### C. Kesenambungan

- mengeksposisikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.
- meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

#### D. Hiburan

- menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi
- meredakan ketegangan sosial

#### E. Mobilisasi

- mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

Disamping memberikan fungsi, media massa juga bisa menghasilkan disfungsi.<sup>3</sup> Disfungsi adalah dampak yang tidak diharapkan atau kurang menguntungkan bagi masyarakat. Untuk fungsi informasi, media massa memberikan disfungsi antara lain menimbulkan kepanikan dan mengancam stabilitas sosial. Untuk fungsi korelasi, disfungsinya adalah merintangai perubahan sosial jika kritik sosial diabaikan.

---

<sup>3</sup> Right, *ibid*, hal. 15-17.

Untuk fungsi kesinambungan budaya, disfunksinya antara lain adalah memperbesar massa di tingkat masyarakat. Massa adalah konsep yang merujuk pada individu-individu yang tak memiliki ikatan satu sama lain. Sedangkan disfungsi hiburan, bisa mengalihkan perhatian publik terhadap aksi-aksi sosial.

Dengan kata, media massa senantiasa memberi dampak pada kehidupan sosial, bukan saja yang diharapkan (fungsi) tetapi juga yang tidak diharapkan (disfungsi). Dari kacamata positivisme atau status-quo, peranan positif media massa selalu didampingi oleh peranannya yang negatif. Tentu saja dampak yang bisa terpengaruh oleh media adalah masalah karakter dan pekerti masyarakat. Dipercaya bahwa di tengah masyarakat media massa mampu mempengaruhi masyarakat baik karena penggunaannya (*uses*) maupun isinya (*content*).

Paling tidak ada dua pandangan tentang kemampuan media mempengaruhi masyarakat.<sup>4</sup> Pertama pandangan dominan yang menganggap media sebagai faktor utama dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam pandangan ini media dianggap sangat ampuh (*powerful effect*) dalam mempengaruhi perilaku sosial.

Pandangan kedua yang lebih terbatas (*limited effect*) menganggap media hanyalah salah satu faktor dari sebab terjadi tindakan sosial. Sebab terjadinya satu tindakan sosial merupakan akumulasi dari berbagai sebab dimana media hanya menjadi salah satu dari sekian penyebab itu.

---

<sup>4</sup> Baran, Stanley J dan Dennis K. Davis, *Mass Communication Theory*, Wadsworth, 2000.

## **II.2 Etika Media Massa**

Bukan karena kebetulan jika kemudian kehidupan media massa mendapat sorotan dari segi etika karena berbagai potensinya mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk aspek moral. Ragam pandangan tentang etika media pun bermunculan, yang pada akhirnya menuntut agar media bertanggung jawab sesuai jenis etika yang dianutnya.

Berkenaan dengan kepada siapa bertanggung jawab, dikenal tiga kelompok besar dalam teori-teori mengenai etika. Ketiga kelompok teori ini, yang juga sering disebut sebagai *mega-theories*, selanjutnya memayungi beberapa teori yang muncul setelahnya. Ketiganya itu adalah *Deontological Ethical Theory*, *Teleological Ethical Theory*, dan *Subjective Theory*.

### ***Deontological Ethical Theory***

Dalam pandangan teori ini apa yang dimaksud dengan etika adalah hal yang sesuai dengan formal, peraturan, prinsip, atau petunjuk. Jika seseorang mengikuti aturan maka ia dikatakan mempunyai etika, dan sebaliknya jika ia melanggarnya maka ia akan dianggap tidak mempunyai etika. Tokoh dari pendekatan ini adalah pemikir rasionalis dari Jerman Immanuel Kant.

### ***Teleological Ethical Theory***

Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang mencoba menentukan apa yang akan dia lakukan dengan mempertimbangkan

konsekuensi atau akibat dari apa yang dia lakukan. Artinya seseorang memilih untuk melakukan sesuatu hal dan meninggalkan hal lain dengan mempertimbangkan dari akibat yang akan timbul. Tokoh dari kelompok teori ini adalah filsuf Inggris yang bernama John Stuart Mill.

### **Subjective/ Personalists Theory**

*Subjective theory* percaya bahwa tindakan manusia adalah tidak rasional. Tindakan itu lebih bersifat spontan, dan didasarkan atas insting, atau spiritual. Seseorang mempunyai semacam cita rasa moral yang mendorong dia untuk melakukan hal yang benar. Teori ini didukung oleh para filsuf eksistensialis seperti Kierkegaard atau Nietzsche.

Untuk pelaksanaannya dalam bidang media, terjadi dua pandangan, yaitu pendirian professional dan pendirian humanistik. Menurut pendirian professional, para pekerja media seperti reporter akan melaporkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi tanpa mempertimbangkan apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Misalnya reporter dalam pendirian ini tidak akan sungkan-sungkan untuk menulis nama seorang korban pemerkosaan.

Sebaliknya menurut pendirian humanistik, para pekerja media harus mempertimbangkan konsekuensi, memperhatikan prinsip-prinsip yang umum. Pada kasus yang sama, seorang reporter yang menganut pendirian ini, tidak akan menuliskan nama dari korban

pemeriksaan karena mempertimbangkan akibat yang akan diterima oleh korban tersebut.

Seperti telah disinggung di atas, ada tiga kelompok teori besar yang memayungi beberapa teori mengenai etika. Teori-teori yang berada di bawah payung ketiga *mega-theory* itu dikelompokkan menjadi:

## **Kelompok Teori Etika Deontologis**

### *1. Acquired-Virtue Ethics*

Teori ini disokong oleh dua teoritis klasik, yaitu Aristoteles dan Confucian. Menurut teori ini, etika adalah sesuatu yang terbentuk dari konsep mengenai kebajikan dan praktek yang terus menerus dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis. Dalam praktek media, etika ini membentuk media yang moderat dan dialektis. Media dalam etika ini akan menghindari segala sesuatu yang bersifat ekstrim dan selalu berusaha mencari jalan tengah.

### *2. Religious Morality.*

*Religious morality* menyatakan sesuatu yang benar adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi pedoman dan panutan dalam pandangan ini adalah kitab-kitab suci, seperti Islam memiliki Al Quran. Jurnalisme yang terbentuk dari pandangan ini adalah jurnalisme yang berusaha untuk mengikuti segala peraturan yang ada dalam agamanya. Tokoh dari pendekatan ini adalah Emil Brunner.

### 3. *Ethical Absolutism*

Pendekatan ini sangat mempercayai kebenaran merupakan sesuatu yang universal, semua prinsip moral dapat diterapkan dimana saja tanpa terkecuali. Kebenaran merupakan sesuatu yang absolut. Dalam praktek di media massa, etika ini mengharuskan para jurnalis untuk menempatkan kutipan dari narasumber dan melarang untuk mengubah setiap kutipan langsung.

### 4. *Sosial Contract Theory*

Asumsi dari teori ini adalah individu telah melakukan kontrak sosial. Dia menerima segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak sosial tersebut. Hanya dalam kontrak sosial seseorang akan melakukan sesuatu yang bermoral, karena hanya pada saat itulah seseorang baru mau memperhatikan kepentingan orang lain. Berbeda jika seseorang yang tinggal di hutan sendirian tanpa adanya ikatan sosial, ia akan melakukan segala sesuatu yang ia inginkan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dari kontrak sosial ini pula lahir teori media *sosial responsibility theory*.

## **Kelompok Teori Etika Teleologis**

### 1. *Ethical Egoism*

Pendekatan ini menganggap bahwa satu-satunya kegiatan seseorang adalah untuk mencapai keinginan pribadinya.

Dalam hal ini yang menjadi pokok perhatian adalah pencapaian seseorang dalam memenuhi hasrat pribadinya. Pendekatan ini menolak segala bentuk pengorbanan, baik dari satu pihak ke pihak lain maupun sebaliknya. Tokoh dari pendekatan ini adalah Ayn Rand dan Leonard Peikoff.

## 2. *Machiavellian Ethics*

Sesuai dengan namanya, pendekatan ini adalah pendekatan yang bersumber dari pemikiran tokoh asal Florence Nicollo Machiavelli. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang pragmatis, fleksibel, relativistik, dalam memandang etika. Saat ini, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling banyak dianut oleh media massa sekarang. Media-media tersebut sangat pragmatis dan terkesan menepikan etika demi mencapai tujuannya, yaitu memperoleh audiens sebesar-besarnya. Contoh praktis dari pendekatan ini adalah penggunaan *hidden camera* maupun *undercover reporting*.

## 3. *Utilitarian Ethics*

Etika ini mengasumsikan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang baik untuk orang terbanyak, *greatest happiness to the greatest number*. Pendekatan ini mendorong etika ke sebuah arah baru, yang lebih menekankan pada pentingnya makna dan kesimpulan. Tokoh dari pendekatan ini adalah John Stuart Mill dan Jeremy Bantham. Pada ranah komunikasi massa etika ini berlaku ketika media lebih mementingkan orang banyak dari pada kepentingan golongan minoritas.

#### 4. *Situation Ethics*

*Situation ethics* lahir dari proses dialog antara *antinomian ethic* dan pendekatan *legalist*. Dalam pandangan ini, untuk mendefinisikan apakah sesuatu sesuai dengan etika atau tidak, harus mempertimbangkan beberapa situasi yang melatar belakanginya. Semua tindakan manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari situasi yang melatarbelakanginya. Hanya robot yang mempunyai kebenaran absolut. Menurut Leonard Peikoff, pandangan ini merupakan pembaharuan dari pendekatan *relativism*.

### **Kelompok Teori Etika Personalis**

#### 1. *Ethical Subjectivism*

Dalam pendekatan ini etika merupakan sesuatu yang berasal dari perasaan. Tidak ada objektivitas mengenai benar atau salah. Sesuatu akan dimaknai sebagai sesuatu yang benar jika sesuai dengan perasaan seseorang. Dalam tataran media, apa yang dilaporkan oleh seorang reporter tidak dapat dikatakan jelek atau salah, tetapi hal itu hanya merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan kita. Karena sangat tergantung pada perasaan, teori ini juga dikenal dengan *emotivism*.

#### 2. *Antinomian Ethics*

*Antinomian Ethics* merupakan pendekatan yang mengabaikan semua prinsip dasar, peraturan, standar, dan hukum.

Pendekatan ini cenderung pada moralitas yang anarkis dan nihil. Dasar dari pendekatan ini adalah teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Karena pendekatannya yang radikal dalam menentang kemapanan, pendekatan ini sering berbenturan dengan pendekatan yang mapan seperti pendekatan *legalist*.

### 3. *Intuitive Ethics*

*Intuitive Ethics* mungkin merupakan doktrin yang paling tua mengenai etika. Kita bisa mengetahui apakah sesuatu salah atau benar melalui intuisi. Intuisi memberikan panduan dan jawaban ketika kita menanyakan apa yang harus kita lakukan. Tuhan telah menanamkan *moral sense* pada setiap orang yang memungkinkan dia bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Salah seorang yang percaya pada pendekatan ini adalah James Wilson.

### 4. *Existentialist Ethical Theory*

Inti dari pendekatan ini adalah menempatkan integritas, kebenaran, dan kejujuran manusia sebagai perhatian utama untuk mengembangkan kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Menurut pendekatan yang dikomandoi oleh Sorren Kierkegaard ini, manusia adalah makhluk yang mempunyai kebebasan dan mempunyai pilihan bebas. Kedua kemampuan itu memungkinkan manusia untuk menentukan dan mengambil keputusan. Dan semuanya itu disertai tanggung jawab terhadap semua yang pilihan dan keputusan yang ia ambil. Dalam tataran media massa, media merupakan pihak yang

mempunyai kekuasaan untuk memutuskan kemana ia akan melangkah.

## **Sub-Teori yang Tidak Dapat Dipetakan Kemana-mana**

### ✓ *Cultural Relativism*

Teori ini percaya budaya yang berbeda akan melahirkan aturan mengenai moral yang berbeda pula. Dalam pandangan ini etika atau aturan moral tergantung dimana tempatnya. Artinya masing-masing tempat mempunyai aturan moral atau etika sendiri. Penganut pandangan ini adalah seorang Antropolog bernama Ruth Benedict.

Dari berbagai pemaparan mengenai beragam teori mengenai etika, dapat disimpulkan bahwa ternyata pendekatan mengenai etika tidak sederhana. Tidak hanya ada dua sisi yang saling berseberangan, seperti baik dan buruk, atau hitam dan putih, tetapi masalah etika merupakan masalah yang kompleks. Ada berbagai faktor dan pendekatan untuk menilai apakah sesuatu itu sesuai dengan etika atau tidak.

Namun begitu, pandangan dari John C. Merrill<sup>5</sup>, pakar etika komunikasi kiranya sangat membantu untuk melihat kinerja media kita dalam pembentukan karakter dan pekerti bangsa. Ia menyatakan etika media merupakan kajian yang memberikan perhatian kepada perilaku praktisi media, apakah yang mereka lakukan itu benar dan

---

<sup>5</sup> Merril, John C., *Journalism Ethics, Philosophical Foundations for New Media*, St Martins Press, 1997

salah, baik atau buruk. Etika adalah kajian mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan. Titik awal dari kajian mengenai etika adalah adanya perhatian mengenai etika itu sendiri oleh para praktisi media. Perhatian terhadap etika menjadi penting, karena dengan adanya perhatian tersebut mendorong praktisi media untuk mempunyai komitmen terhadap etika ketika dihubungkan dengan kebijakan yang diambilnya.

Merril membagi dua jenis etika media (lihat Tabel 1). Yang pertama biasa disebut dengan etika *communitarian*, dan yang kedua adalah etika *libertarian*. Meskipun keduanya nampak bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya keduanya tidak bisa dipisah. Karena bagaimanapun juga, etika *communitarian* tidak bisa mengabaikan etika *libertarian*, demikian pula sebaliknya.

**Tabel 1: Perbandingan antara Etika Komunitarian dan Libertarian**

<b><u>Communitarians</u></b>	<b><u>Libertarians</u></b>
<p><i>Groupist</i> (mengutamakan kepentingan kelompok)</p> <p><i>Egalitarians</i> (percaya bahwa setiap orang adalah setara dan harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama)</p> <p><i>Altruists</i> (memperhatikan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain lebih daripada diri sendiri)</p>	<p><i>Individualist</i> (mengutamakan kepentingan individu)</p> <p><i>Enlightment liberals</i> (menekankan pada pencerahan diri)</p> <p><i>Existentialists</i> (lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain)</p>
<p><b>Traits</b></p> <p><i>Restrained freedom</i> (mengontrol kebebasan)</p> <p><i>Civic transformation</i> (menekankan transformasi/ perubahan sosial)</p> <p><i>Normative ethics codes</i> (kode etik yang sifatnya normatif)</p> <p><i>Selflessness</i> (memikirkan keinginan atau</p>	<p><b>Traits</b></p> <p><i>Maximum freedom</i> (mengutamakan kebebasan yang sebesar-besarnya)</p> <p><i>Self-transformation</i> (menekankan perubahan diri)</p> <p><i>Personal ethical codes</i> (kode etik yang sifatnya personal atau individu)</p> <p><i>Self-concern</i> (Menjadikan diri sebagai pusat perhatian)</p>

<p>kebutuhan dan kebahagiaan orang lain lebih besar daripada diri sendiri)</p> <p><i>Cooperation</i> (menekankan pada kerjasama)</p> <p><i>Social influence on policy</i> (terdapat pengaruh kelompok pada kebijakan)</p> <p><i>Bonding/conformity</i> (berprilaku untuk menjaga ikatan sosial)</p> <p><i>Group-progress</i> (kita berprilaku untuk kemajuan kelompok)</p> <p><i>“Other-directed”</i> (perilaku kita diarahkan oleh kondisi lingkungan sosial)</p> <p><i>Like-minded worldview</i> (pandangan yang serupa atas sebuah gagasan)</p> <p><i>Positive, cohesive news</i> (berita yang ditulis menjaga persatuan dan kesatuan)</p> <p><i>Social guidance</i> (memuat berita yang sifatnya menghimbau)</p>	<p><i>Self-enhancement</i> (menekankan peningkatan prestasi individu/ perkembangan individu)</p> <p><i>Personal influence</i> (keputusan tidak dipengaruhi oleh kelompok)</p> <p><i>Autonomy/ diversity</i> (kita bertindak atas otonomi kita)</p> <p><i>Competition/ meritocracy</i> (mengutamakan pencapaian prestasi diri kita dengan berkompetisi)</p> <p><i>“Inter-directed”</i> (perilaku diarahkan oleh diri sendiri)</p> <p><i>Diverse-worldview</i> (pandangan yang berbeda-beda atas sebuah gagasan)</p> <p><i>Total spectrum news</i> (spektrum berita luas sekali)</p> <p><i>Social information</i> (media memberikan informasi apa saja)</p> <p><i>Universal competition</i> (harus ada kompetisi)</p> <p><i>Disagreement on ethics</i></p>
--	--

<p><i>Universal solidarity</i> (harus ada solidaritas)</p> <p><i>Agreement on common ethics</i> (ada kesepakatan yang sama terhadap etika)</p> <p><i>Universal-legalistic ethics</i> (etika bersifat norma yang tetap)</p> <p><i>Media professionalism</i> (Menekankan pada profesionalisme media)</p>	<p>(kesepakatan yang berbeda-beda terhadap etika)</p> <p><i>Relative-situation ethics</i> (etika bersifat relatif)</p> <p><i>Anti-media professionalization</i> (Kurang menekankan pada profesionalisme media)</p>
<p><b>Exemplars</b></p> <p>Confucius, Plato, Marx, Macintyre, Bellah, Lasch, Hutchins, Niebuhr, Buber, Jonas, Etzioni, Sandel, Christians</p>	<p><b>Exemplars</b></p> <p>Lao-tzu, Socrates, Aristotle. Locke, Jefferson, Madison, Voltaire, Constant, Tocqueville, Mill, Thoreau, Camus, Jaspers, Rand, Nozick, Hayek, Merill</p>

Komunitarian adalah etika yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau masyarakat. Etika ini didasarkan pada etika *normative* yang ada dalam masyarakat. Dalam tataran media, etika ini berlaku pada media yang mengutamakan etika universal. Mereka beranggapan bahwa solidaritas universal adalah inti dari tatanan sosial dan moral. Para jurnalis dalam pandangan etika ini akan mengabaikan konsep-konsep mengenai otonomi dari jurnalis, individualisme, dan kebebasan dalam arti negatif.

Orientasi etika dalam *libertarian* adalah kebebasan personal yang maksimum dalam menentukan nilai-nilai etika. Etika libertarian lebih mengutamakan kepentingan individual, eksistensialisme, dan pencerahan. Media yang menganut etika ini akan memberikan penekanan pada pengembangan diri.

Dengan pemetaan seperti ini kita dapat dengan lebih mudah melihat kecenderungan sikap para penggiat media di tengah masyarakat kita. Dari masing-masing pendapatnya, kita dapat meneropong apa yang sedang terjadi dalam dunia media kita khususnya berkenaan dengan pendidikan karakter dan pekerti bangsa. Jika mutualisme sebagai modal dasar bagi kemajuan bangsa, tentu prinsip komunitarianlah yang dikedepankan media; namun jika kebebasan itu sendiri yang hendak diperjuangkan maka prinsip libertarian lebih cocok dilaksanakan oleh media kita.

## **BAB III**

### **HASIL KAJIAN**

#### **III.1 Realitas Karakter dan Pekerti Bangsa dalam Pandangan Orang Media**

Dari hasil wawancara mendalam dengan para nara sumber, ditemukan bahwa umumnya mereka menilai karakter dan pekerti bangsa kita dewasa ini dalam kondisi yang tidak baik. **Satrio Arismunandar** dari *Trans TV* menyatakan, bahwa “Sekarang ini menurut saya, kita sedang mengalami disorientasi. Ketiadaan arah yang jelas dalam konteks yang luas, mengapa bisa begitu? Pertama, arus globalisasi dan paparan media yang begitu luas seolah-olah “tidak terbendung”, sehingga ada perubahan-perubahan nilai yang sangat cepat di mana orang tidak sempat melakukan penyesuaian diri dengan cepat. Kedua, di kalangan para tokoh-tokoh masyarakat juga tidak ada visi yang jelas mau diarahkan ke mana yang akhirnya tidak mampu mendorong sehingga terjadilah disorientasi itu.

Jika dibandingkan, kita mengalami kemunduran. Mudahnya jika dibandingkan dengan zaman Soekarno, terlepas dari kondisi ril ekonomi yang sedang parah saat itu, tapi pemimpin bangsa sendiri, Bung Karno punya visi atau pandangan ideologis yang jelas mau dibawa ke mana Indonesia, begini-begini.... Tapi kemudian ketika di zaman Soeharto penekannya kepada ekonomi, itu seolah-olah visi

hanya persempit mengejar kemajuan ekonomi. Padahal ekonomi itu kan hanya baru satu aspek saja dari hal-hal lainnya. Sementara hal-hal yang lain itu kurang diperhatikan.”

Satrio menambahkan, ”salah satu hal yang kurang mendapat perhatian adalah pendidikan kebangsaan, itu kan kurang, minim sekali. Hukum kurang, keadilan dan kemanusiaan tidak diperhatikan. Kedewasaan politik dibatasi, pers dihambat. Jadi orang tidak dididik, dibiasakan dalam lingkungan di mana bisa berinteraksi secara *fair* dan terbuka. Apa yang terlihat di media bukan sesuatu yang ril, tapi sesuatu yang ditutupi. Kita tidak pernah membaca secara terbuka di zaman Soeharto koran mengkritik korupsi. Padahal orang tahu korupsi itu arahnya ke keluarga Soeharto. Jadi banyak hal yang ditutupi. Orang mau mendirikan partai pun dibatasi hanya tiga, yakni PPP, PDI dan Golkar. Jadi orang-orang tidak dapat mengembangkan karakternya secara penuh karena dibatasi macam-macam tabu yang diciptakan sendiri oleh penguasa. Misalnya pendidikan P4 pun akhirnya semacam indoktrinisasi. Bahkan dalam penatarannya pun kita nggak bisa ngomong terbuka. Kalau Anda ingin lulus ya harus tahu pakemnya. Orang yang benar-benar kritis malah nggak berkembang, nggak diterima di mana-mana karena akan dianggap ekstrim. Nah di zaman Bung Karno ekonominya kacau, tapi pendidikan karakternya berkembang. Ada yang komunis, Islam, nasionalis, macam-macam. Walaupun akhirnya terjadi benturan-benturan, tapi muncul karena orang-orang memiliki karakter-karakter yang kuat dan mereka bisa mengambil jarak Kita secara ideologi

berbeda tapi misalnya meskipun secara ideologi berbeda jika ada isteri elit politik komunis yang sakit, yang dari islam menjenguk nggak apa-apa. Sekarang kan hal itu di sini nggak ada. Jadi, makin tersekat-sekat, makin jauh karena perbedaan ideologi. Nggak bisa mengambil jarak mana yang personal, partai, negara, nggak jelas sekarang. Sekarang bahkan orang-orang nggak punya ideologi, semua pragmatis. Contoh, apa bedanya PPP, PDI Perjuangan dan Golkar misalnya? Kita nggak lihat perbedaannya sekarang. Ujung-ujungnya duit. Meskipun ada ciri-ciri tertentu, ujung-ujungnya jadi hablur, semakin nggak jelas.”

Menurut Satrio, kemerosotan tersebut terus bertambah hingga masa Megawati. ”Di zaman mengawati korupsi malah lebih banyak dan merata. Di zaman Soeharto ada tapi sebatas hanya klik-kliknya saja. Sekarang di masa Mega korupsi di mana-mana, terbuka dan terang-terangan. Sebetulnya bangsa ini sudah sakit, dalam arti orang itu jika sehat secara karakter bila ketahuan malu, sekarang kalau ketahuan malah bangga, nggak malu. Jadi pekertinya sudah hancur. Misalnya ada PNS yang gajinya sekitar 200 ribuan, tapi punya mercedes. Harusnya kan dia malu, dari mana ia bisa punya mercedes, padahal tidak ada harta warisan dan orang tuanya juga nggak kaya, harusnya kan dia malu pake mercedes. Karena orang kan akan menilai gaji 200 ribu kok bisa pake mercedes, tapi di sini orang malah bangga jika bisa pake mercedes dan nggak ada malunya. Celaknya lagi, masyarakat juga sakit. Sakitnya di mana? Orang yang jelas-jelas sudah koruptor malah masih dihormati dan

diberi tempat terhormat. Oleh media massa sendiri juga diwawancarai dan diberi tempat terhormat sama dengan orang yang tidak melakukan korupsi. Jadi, media massa ikut berperan. Masyarakat sakit, negaranya sakit, media massa termasuk insan-insan persnya juga ikut sakit. Malah permisif pada hal-hal yang tidak baik. Orang-orang malah seolah tidak lagi mampu membedakan mana karakter yang baik mana karakter yang tidak baik. Mana pekerti yang pantas mana pekerti yang tidak pantas. Jadi, saya juga bingung bagaimana cara memperbaikinya?"

Hal senada dikemukakan **S. Sinansari ecip** dari KPI. "Saya sependapat dengan banyak orang bahwa karakter dan pekerti bangsa Indonesia merosot, penghargaan terhadap orang tua maupun dosen merosot. Saya mendapat cerita dari dosen lulusan S2 UI yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Katholik di Yogya yang pada dasarnya ketat dalam peraturan bertutur ada mahasiswanya yang menantangnya, "kalau saya tidak mau bagaimana Bu?". Zaman dulu rasanya hal itu tidak ada.

Menurut Sinansari ecip, "zamannya Soekarno yang lebih baik, di mana lingkungan kita yang baru merdeka tidak ada yang iri-irisan, cela-celaan kiri-kanan kurang, tidak makan tidak apa-apa, pilihannya mati atau hidup. Zamannya Soeharto kekayaan banyak tapi yang terbuang lebih banyak dibanding yang termanfaatkan dengan baik. Zamannya Habibie dan Gus Dur pendek hanya satu tahun. Megawati kondisinya sudah parah, mau segera bangkit susah. Apalagi diperparah dengan kepemimpinannya kurang mantap, kurang

konseptual, dia dan menterinya mau apa nggak jelas. Indonesia mau dibawa ke mana juga tidak jelas. Kalau Megawati sudah konseptual dari awal apa yang mau dilakukan akan lebih baik. Hasil-hasil yang sudah dilakukan tidak ditunjukkan. Ketika membutuhkan baru ditunjukkan, ya sudah terlambat.”

Pendapat serupa juga dikemukakan **Abdullah Alamudi** dari LPDS. Ia mengatakan, ”Menyedihkan. Sebenarnya masyarakat pers sudah memberikan pendidikan karakter terhadap bangsa ini jauh sebelum republik ini berdiri. Ketika pertama kali koran berdiri yaitu pada tahun 1744 sudah menanamkan nilai-nilai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kemudian di jaman pergerakan pada tahun 1908, 1920 dan sebagainya masyarakat pers mendidik bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dan menyatakan bahwa kita harus merdeka, dari situ ditanamkan karakter kebebasan. Jadi disitu pers sudah memberikan pendidikan kepada bangsa ini jauh sebelum republik ini sendiri berdiri dan itu berlangsung terus, tapi sayang sekali azas yang dipahami oleh pers itu kemudian dibekukan oleh penguasa-penguasa baik itu Pemerintah Belanda, Jepang, pemerintah Indonesia sendiri selih berganti dengan menentang kemerdekaan pers itu. Sehingga kebebasan untuk mengkritik pemerintah atau penguasa tidak berjalan akibatnya korupsi sedemikian luasnya berakar sekarang ini. Supaya Anda tahu korupsi itu memiskinkan masyarakat, jadi kembali lagi ke masalah yang sebenarnya. Pemerintah kita menggunakan Undang-undang yang dibuat penjajah untuk menjajah, dipakai oleh pemerintah sekarang

untuk menjajah bangsanya sendiri. Jadi karakter bangsa ini terkekang terus menerus oleh pemerintahnya sendiri. Karakter bangsa kita sulit untuk berkembang, tidak sebagaimana mestinya bangsa yang merdeka. Orang Korea itu merdeka bersamaan dengan Indonesia mengalami pembodohan yang sama dengan Indonesia tapi ia berubah cepat. Bertahun-tahun diancam oleh Korea Utara tetapi lihat mereka lebih berhasil, karena apa? Di sana pemerintahnya mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku kecurangan, pelaku korupsi, ia memerintah juga dengan tangan-tangan besi pemerintahan diktator, tetapi di Korea kalau ada jenderal yang berbuat kesalahan misalnya ia dianggap korupsi atau gagal maka dia segera dipecat, dihukum, dia diberi jabatan yang lain. Di jaman orde baru kalau ada jenderal yang memegang BUMN gagal menjalankan BUMN itu bukannya dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat malah diberi jabatan yang lain. Pemerintah kita tidak mendidik bangsa ini, jadi bagaimana kita berkembang memiliki karakter sebagai bangsa yang merdeka?"

**Bejo Untung** dari LSPP mengatakan bahwa pekerti bangsa kita masih jauh dari harapan, karena yang kita harapkan karakter bangsa kita saat kemerdekaan itu sebagai bangsa yang mandiri, punya rasa tanggung jawab, bangsa yang tidak tergantung kepada bangsa lain. Sementara kenyataannya sekarang generasi muda kita sudah kehilangan orientasi sosialnya, menerima apa saja yang datang dari luar tanpa menyaring lagi, sebuah kepribadian yang kurang bagus. Misalya model berpakaian, cara makan, cara

berbelanja, itu kan orang lain sementara ia tidak menyerap apa yang ada di balik itu. Demikian juga kalau kita melihat misalnya tawuran pelajar di jalan, itu kan sikap yang tidak bertanggung jawab dalam berkepribadian. Makanya yang namanya tanggung jawab itu selain ada tanggung jawab social ada pula tanggung jawab pribadi. Kalau misalnya dia tawuran itu kan dalam pribadinya dia sudah tidak ada rasa tanggung jawab. Dia sebagai pelajar bertanggung jawab kepada orangtuanya

“Dalam satu kata bisa dirumuskan adalah dekadensi,” kata **Stanley** dari ISAI, “dan menurut saya industri media ini kemudian menggunakan fenomena dekadensi ini untuk meraup keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kepentingan dan kewajiban moral mereka untuk membentuk karakter, itu yang terjadi sebetulnya.”

Lebih tegas lagi dikatakan **Budiarto Sambazy** dari *Kompas*. “Sebetulnya, sudah terpuruk sekali. Dalam arti sebentar-sebentar ngamuk, sebentar-sebentar korupsi, sebentar-sebentar gak disiplin. Itu terjadi setiap hari dalam perjalanan kita. Mulai berangkat ke kantor, diskusi di kantor, dalam mengadakan peliputan, semua selalu begitu. Karakter ini sudah gak ada. Sudah gak ada karakter bangsa ini. Dan memang *amok* itu yang paling penting. Saya sempat prihatinkan dalam beberapa tulisan-tulisan. Ini sudah gawat. Sebentar-sebentar ngamuk kayak kemarin di Bogor, Bojong Gede ya. Amok. Peristiwa 98 amok. Lalu peristiwa Tri Sakti, amok. Semanggi 1, 2, amok. Lalu juga peristiwa tahun 65. Amok juga. Jadi gak ada karakter kalau menurut saya. Gak ada karakter dalam arti memang

kita tidak pernah bermaaf-maafan dengan sejarah. Gak pernah jujur dengan sejarah. Ini dalam konteks politik ya. Menurut saya gak punya karakter, *sorry* ya.”

**Indra Bigwanto** dari PRSSNI mengatakan, “Sebagian orang mengatakan bahwa karakter bangsa kita kok jadi berubah katanya, dibandingkan dengan zaman dulu, zaman orde baru lah misalnya, dulu lebih santun dan sekarang tidak santun. Kalau saya ingin mengatakan tidak ada perubahan dalam sudut destruktivitas bangsa kita dari zaman pak Harto kemarin sampai sekarang, yang ada adalah bagaimana mewujudkan rasa destruktifnya. Itu saya sangat percaya bahwa pada zaman kemarin itu sebetulnya keinginan untuk merusak karena diperlakukan tidak adil dan seterusnya itu sangat besar, masalahnya mungkin faktor ketakutannya lebih besar sehingga kemudian tidak sampai, action itu, tidak sampai dilakukan. Nah, sekarang saya merasa, saya melihat bahwa mereka harus demo, mereka harus menyatakan ketidakpuasan dengan cara melempar. Ya mereka harus lakukan sekarang. Bukan berarti bahwa itu benar. Tetapi saya percaya dengan iklim yang kita lihat sekarang ketika orang menjadi tahu bahwa perilaku kelembagaan ini tidak bekerja seperti mestinya dan kemudian sudah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan tetapi tidak bisa maka orang harus bereaksi seperti itu.”

Menurut **Jenny Hardono** (praktisi iklan), “Sekarang bangsa Indonesia terus terang sedang berubah luar biasa tapi itu juga hal

yang tidak bisa terbendung karena adanya globalisasi. Budaya kan juga berubah ya gak sih ? kalo kita melihat, mulai kita zaman dulu ama sekarang udah beda dan kita juga kalo menurut aku sih, kita juga gak bisa memaksakan loh ya. Tapi kita sekarang nyaring diantara yang ada itu. Apa yang masih merupakan nilai konkrit adalah nilai unique kita. Itu yang kita pegang dan itu yang kita jaga terus mungkin begitu. Tapi bahwa irisme persen di Bandung dengan zaman dulu ya emang begitu. Kita harus juga ngga bisa terus kita kepengen, perilaku anak muda di zaman saya sama dengan anak muda di zaman sekarang.

"Itu beda sewaktu saya masih kecil saya gak pernah berantem sama orang tua. Kalo orang tua saya bilang A ya saya ikutin A. Atau juga kalo orang tua saya melakukan B. Tetapi tidak dilakukan di depan orang tua saya anak saya sekarang nggak bisa begitu artinya mereka akan dengan Tanya kenapa tanya kenapa saya harus melakukan itu. Jadi saya harus memberikan *reason why* kepada mereka agar mereka bisa cerna kan begitu sekarang. Itukan sudah terjadi pergeseran. Nah itu terus terang memang gak bisa kita lawan kalo menurut saya. Tapi kita ambil baiknya dan kita kembangkan. Sebagian orang Indonesia apa sih yang menurut kita baik, kita memang kalo mikir negative-nya banyak sekali. Kaya sekarang ini ya anak muda sekarang. Mereka lebih kepada generasi instant yang semua pengen cepat jadi. Semua selesai cepat, gak proses itu di tiadakanlah, seperti kayak gitu. Nah, itu yang selain saya coba mengingatkan kepada mereka bahwa you have to start, dari awal

kamu harus kerja keras, ya *have to learn*. Kamu gak bisa Cuma duduk dan siap dituangin oleh orang-orang. Nah ini hal-hal kayak gini hal-hal yang memang saya ingin tekankan kepada mereka, hidup tuh menjadi sulit karena sekarang banyak perjuangan sekarang zamannya kita tuh apalagi kita di media *crowded*, pilihan sudah semakin banyak dan sebagainya nya gitu yah. Sekarang gimana cara kita bekerja dengan baik. Itu yang saya coba tanamkan.

”Generasi yang sekarang yang saya tangkap begitu jadi *fighting speed* –nya sedikit sekali karena ini mungkin *backgroundnya* juga karena orang tuanya sibuk. Sehingga mereka selalu mengalami penyelesaian yang serba cepat. Jadi, apa sih yang ini, ini dikasih uang, dikasih apa. Sehingga gak ada suatu nilai emosional yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka *appreciate*. Mereka kurang apresiasi itu. Jadi apapun sekarang gini misalnya gak naik kelas orang tuanya langsung pindahin sekolah si anak. Masuk sekolah baru langsung naik kelas. Kan seperti itu kan jadi penyelesaian yang pendek yang ringkas. Jadi mereka gak pernah merasakan kekecewaan atau kurang sekali yang merasakan kekecewaan sakit hati karena orang tua akan selalu menutupi ketika itu. Ini nih yang saya rasakan. Saya juga “ *I was guilty* “ terus terang ya tapi kita memang, ngobrolah sama anak-anak. Sama anak-anak saya, sama anak-anak mahasiswa saya bagaimana caranya menyiasati ini artinya ini adalah *fact of light* dan ini bukan hal yang baik ada yang kita bisa terima ada yang nggak, itu hal biasa.”

### **III.2 Karakter dan Pekerti Bangsa: Perkembangan dan Faktor Penyebabnya**

Berdasarkan pengalaman di akademisi, di media dan di masyarakat, Sinansari ecip mengartikan karakter bangsa adalah menunjukkan ciri-ciri pokok yang dimiliki oleh suatu bangsa di banding bangsa yang lain. Meskipun ada ciri-ciri umum yang dimiliki oleh suatu bangsa di antara bangsa yang lain, misalnya ramah, lemah-lembut. Semua bangsa yang beradab adalah bangsa yang lemah-lembut, bangsa yang tidak beradab adalah bangsa yang tidak berbudi. Ciri-ciri spesifik (pokok) misalnya cepat bangkit dari keruntuhan seperti Jepang, Korea, Taiwan bahkan Thailand. Bahkan Malaysia sebagai bangsa melayu pun cepat bangkit, dan cepat mapan secara ekonomi Malaysia berani tidak menerima bantuan IMF dan mematok nilai tukar kurs dollar dan tidak tergantung dengan Barat. Secara pendidikan, Malaysia berani melakukan investasi kemanusiaan. Di saat *booming* minyak dulu Indonesia tidak memanfaatkannya secara maksimal. Padahal jumlah penduduk Malaysia hanya sekitar 20 juta lebih sementara Indonesia lebih 200 juta. Mahasiswa Malaysia yang sekolah di luar negeri lebih banyak dibanding Indonesia. Pembiayaan beasiswanya jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Karakter itu pada dasarnya berkaitan dengan kondisi-kondisi yang lain, seperti kepemimpinan, ekonomi, kekayaan. Sementara kekayaan Indonesia hampir habis. Selain itu, faktor tipe penjajah itu juga penting di mana Indonesia dijajah oleh bangsa perampok (Belanda) yang bekerja sama dengan pengusaha, beda

dengan Malaysia yang dijajah oleh Inggris. Ini yang dalam perkembangannya mempengaruhi karakter bangsa Indonesia. Pengaruh lingkungan, pendidikan, penjajahan yang berkepanjangan, negara-negara tetangga juga berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa Indonesia.

“Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter dan pekerti bangsa yang pertama adalah pendidikan, yang kedua agama karena saya hampir yakin orang yang tidak beragama tidak memiliki budi pekerti yang baik, yang ketiga adalah media, di mana tidak ada media seperti apa tapi jika ada media semuanya jelek juga seperti apa misalnya kalau semuanya seperti Lampu Merah. Selain itu, yang juga penting adalah . keberadaan buku yang harus banyak diperhatikan sebagai bahan bacaan. Dulu misalnya siswa diwajibkan membaca buku sekian banyak yang dibuat ringkasannya, resensinya yang kemudian didiskusikan. Yang terakhir adalah kelompok-kelompok tutorial atau mentoring dari generasi yang lebih senior ke generasi yang lebih junior, misalnya masalah seks, pemahaman tentang kelahiran, kematian, reproduksi, yang umumnya tidak banyak didapat sekolah. Begitu juga dengan penggalangan pramuka.”

Dalam melihat karakter bangsa, Bejo Untung menggunakan fenomena-fenomena sebagai representasi dari karakter bangsa itu sendiri. Pembentukan karakter bangsa itu harus mencerminkan 3 prinsip dasar yang disebut usakti. Pertama, kemerdekaan dalam bidang politik. Kedua, dalam bidang ekonomi, kemudian yang ketiga, dalam hal budaya. Itu saja kan, sementara manusia yang berbudaya itu seperti

apa? Dan budaya Indonesia itu seperti apa? Masih dalam proses mencari, belum jelas. Tapi bisa dilihat dari fenomena-fenomena yang muncul. Masalah kepribadian bangsa, karakter atau budi pekerti itu hanya sikap-sikap, perilaku yang terlihat misalnya sopan santun, rasa bertanggung jawab, kemudian apa lagi ya? Semangat untuk *survive*, itu yang lebih berat bagi masalah-masalah karakter. Inilah pertahanan diri sebagai sebuah bangsa, arahnya harus kesana kalau karakter bangsa saya lihat; ke situ pendidikan mesti diarahkan. Arahnya bersifat membudayakan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih beradab atau peng-adab-an masyarakat sehingga sekolah bukan hanya sebagai alat formal yang setelah menyelesaikan pendidikan ia tidak tahu mau kemana. Karena ia tidak punya kepribadian kan? Salah satu representasi dari kepribadian misalnya adalah rasa percaya diri.

Menurut Bejo, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter dan budi pekerti bangsa, secara sederhana dari keluarga. Tapi yang namanya keluarga itu terletak di dalam lingkungan masyarakat, dan lingkungan masyarakat diatur oleh sistem yang namanya kebijakan dari atas dimana semuanya akan saling berpengaruh. Kalaupun di pendidikan keluarganya baik, tapi ketika dia sudah keluar dari keluarga dan menjadi anggota masyarakat, sementara anggota masyarakat sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara kan diatur oleh sistem kebijakan dari atas, sehingga dari atas yang mempengaruhi, dari bawah juga mempengaruhi. Disini ada 2 (dua) unsur yang secara cultural. Percuma saja misalnya masyarakat sudah mati-matian ingin membentuk suatu kepribadian yang kokoh, kepribadian yang matang, kepribadian

yang bagus tapi kalau misalnya dukungan-dukungan itu.... Misalnya masyarakat ingin membudidayakan pertanian namun ketika pemerintah tidak memberikan subsidi pupuk maka ia akan mati. Sama saja ketika ada orang yang ingin menjadi wiraswasta, tapi ketika dia tidak diberikan akses untuk meminjam modal karena aturan-aturannya ketat maka ia tidak akan berkembang menjadi bangsa yang mandiri. Sehingga ada pembentukan secara *cultural* dan pembentukan secara *structural* yang direpresentasikan dalam bentuk hukum.”

Di mata Abdullah Alamudi, karakter bangsa bisa dilihat dari kacamata orang awam bahwa karakter ini misalnya rajin bekerja, jujur, terus terang, tidak pendendam, semacam itulah. Selalu melihat ke masa depan, bagaimana memperbaiki dirinya, setiap individu-individu, mencari rizki yang halal. Mencari uang sebagaimana layaknya tetapi dengan cara yang halal, jadi sikap dan mentalnya yang bersih.

Menurut Abdullah, faktor utama yang mempengaruhi karakter adalah keluarga, orang tua, kemudian masyarakat ketika ia sudah mulai sekolah. Itu yang menjadi pembentuk utama karakter itu sendiri, karakter masyarakat, dari keluarganya, dari masyarakatnya. Suatu hal yang banyak mempengaruhi karakter itu adalah lingkungannya. Lingkungannya miskin akan membuat seseorang berusaha untuk merebut sesuatu, berfikir terlalu idealistis terutama dalam memperoleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk masyarakatnya. Kemiskinan itu merusak akhlak orang, karena itu oleh agama sangat penting, tetapi agama saja tidak cukup kalau pemerintah tidak mampu

mengurangi kemiskinan. Kemiskinan yang merusak karakter orang, menjadikan orang mencuri, kemiskinan, ekonomi yang buruk mendorong orang tidak punya pekerjaan karena itu unsur pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama penting. Dan masyarakat miskin harus bisa membangun bersama-sama dirinya sendiri, tapi tidak akan berhasil apabila pemerintah tidak memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan.

**Heru Purwanto** (ANTARA) juga menegaskan, "saya kira yang namanya karakter dan budi pekerti bangsa adalah suatu sifat atau ciri, jadi setiap bangsa itu punya kekhasan masing-masing. Karakter dan budi pekerti itu sudah tentu proses sosialisasi, internalisasi sejak manusia itu lahir. Kalau dibilang karakter dan budi pekerti bangsa itu adalah bagian yang menurut saya secara kolektif, dari yang tadinya individu kemudian dia menjadi satu, karakter dan budi pekerti bangsa.

"Jadi kalau kita bicara tentang apa sih budi pekerti? Maka akan cenderung ke arah kebaikan, bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat, inikan sesuatu yang tergantung sekali dengan lingkungannya. Misalnya pada masa 45 itu adalah masa perjuangan kemerdekaan, lingkungan itu akan membentuk karakter yang berbeda dengan yang sekarang. Waktu itu ekonomi susah, makan saja susah tidak ada barangnya, macam-macam, sekarang gampang banget kan? Kalau kita sering dengar kan anak-anak sekarang kok begini? Ada benarnya juga, dulu kita kan tidak mengenal namanya TV, internet, koran, majalah, jadi semua dalam keterbatasan, jadi apa yang mereka dapatkan lebih terbatas daripada kita sekarang, tapi

sekarang begitu luasnya media-media yang bisa dibaca, dilihat dan didengar oleh anak-anak kita. Jadi karakter dan budi pekerti yang sekarang ini juga diwarnai oleh perubahan-perubahan tadi. Jadi memang saya pikir ada bedanya, kemudian ditanya lalu masa depan bagaimana? Itu tergantung pada apa yang meluncur pada masa depan nanti, memang tidak bisa dihindari, kehidupan berjalan apa adanya, kita tidak sendirian.

“Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang jelas adalah lingkungan dari bangsa itu sendiri, jadi kalau individu itu dari dia lahir, dewasa sampai dia hidup kan di dalam lingkungan tertentu. Penanaman karakter dan budi pekerti itu ada bermacam-macam, ada yang namanya sekolah, rumah dan masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi kalau kita bicara tentang yang mempengaruhi itu sangat banyak, yang jelas adalah pendidikan adalah satu diantaranya, pendidikan yang baik dan norma-norma masyarakat itu sendiri. Jadi pendidikan dia di rumah, memang itu proses dari masa ke masa ya..karakter adalah sebuah sifat, sebuah ciri, yang muncul karena proses sosialisasi, internalisasi yang bergerak seiring dengan berjalannya masa yang mengitari dari kehidupan bangsa itu sendiri. Jadi memang kalau kita bandingkan antara karakter dan budi pekerti bangsa kita dari tahun 1945 dengan karakter yang sekarang itu pasti akan berbeda karena jamannya sudah berubah. Ada pergeseran nilai terutama yang menyangkut budi pekerti walaupun semua orang berbudi pekerti yang terkait dengan norma-norma yang baik.

**Haidar Baqir** berpendapat karakter bisa bisa diterjemahkan sebagai watak; watak itu dibentuk oleh sistem moralitas. Kadang-kadang karakter, watak, moral, itu diidentikkan. Tapi ada sistem moralitas itu mungkin yang disebut sebagai etika. Etika semacam katakanlah sebagai ilmu. Sebenarnya etika itu perkembangan dari ethic; itu semacam ilmu tentang moralitas. Nah, di Indonesia ini saya kira banyak faktor yang membentuk moralitas. Pertama, sudah tentu sistem agama-agama yang berkembang di negeri kita. Dan, kalau kita bicara agama, sebetulnya saya bukan ahli sejarah tapi kita tidak bisa berhenti pada agama Hindu dan Budha, Sebelum agama Hindu dan Budha mungkin sudah ada agama atau sistem kepercayaan lain. Ada yang mengatakan misalnya agama Hindu itu, ada riset yang mengatakan Hinduismen itu berasal dari pengikutnya Nabi Nuh, saya nggak tahu Nabi Nuh itu berapa abad sebeum Masehi. Ada yang bilang agama Budha itu , ada seorang pemikir yang mengatakan pengikut Nabi Zulkifli.

“Saya katakan ini untuk menunjukkkan bahwa artinya pembentukan karekter itu sudah terjadi sejak saat pertama wilayah nusantara ini dihuni oleh orang-orang. Jadi saya kira faktor agama disitu sangat menentukan. Tapi tentu bukan hanya faktor agama, geografi itu juga sangat menentukan. Misalnya kiata tahu orang yang profesinya perikanan dan berdagang, itu mungkin sistem moralitasnya sudah berbeda. Jadi geografi, kemudian kondisi alam, termasuk geografi itu, artinya lokasi dalam peta bumi, terus kondisi alam itu saya kira menentukan. Secara dalam jangka panjang, itu

saya kira membentuk juga sifat-sifat genetik. Jadi agama, geografi dan lain sebagainya akhirnya itu juga dalam jangka panjang akhirnya membentuk faktor genetik yang berpengaruh terhadap sistem moralitas.”

”Jadi saya kira di Indonesia, ya kalau kita mau lihat pengaruhnya adalah pada pengaruh itu muncul yang dari menurut saya pertama dari agama, kedua dari kondisi alam, geografi, sistem politik sudah pasti artinya penguasa-penguasa, sistem kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ditanya karakter bangsa Indonesia itu apa ? Sekarang ini menurut saya kalau kita bicara karakter bangsa Indonesia saat ini, menurut saya sudah agak sulit untuk melakukan delinieasi -membuat batas- tentang apa karakter bangsa Indonesia dan karakter bangsa Thailand, bangsa Philipina, saya kira sekarang globalisasi itu sekarang sudah merembes bahkan sudah sampai ke desa-desa kita. sudah sulit saya kira untuk menyebut karakter itu. Paling banter mungkin pembeda yang bisa kita lakukan adalah perbedaan karakter anantara bangsa timur dan bangsa barat., dimana bangsa Indonesia itu termasuk ke dalam karakter bangsa timur.”

”Tapi sekali lagi karakter itu berubah loh ya, karena tadi saya katakan itu dipengaruhi oleh agama, agamanya berubah-ubah. Dipengaruhi oleh kondisi alam, geografi, itu juga berubah-ubah. Dipengaruhi oleh profesi, profesi juga berbeda-beda, buktinya misalnya Islamnya orang pesisir sama Islamnya orang pedalaman lain. Islamnya petani beda dengan yang pedagang, yang di pesisir

beda dengan yang di pedalaman. Jadi pertama secara internal saja sudah terlalu banyak faktor yang memberikan pengaruh yang menyebabkan sulit kita bicara tentang karakter bangsa Indonesia. Misalnya bangsa Indonesia ramah, apa orang Batak ramah? ramah dalam makna umum. Kalau orang Batak kita bisa sebut ramah, ramahnya orang Batak sama ramahnya orang Jawa juga beda.”

”Jadi di dalam negeri Indonesia saja sudah berbeda. Terus antar warga Indonesia dari berbagai masa sudah lain-lain karena agamanya berubah-ubah, sistem politiknya berubah-ubah, kondisi alam semestanya berubah-ubah. Jadi antar wilayah Indonesia sudah beda, di wilayah yang sama, dalam masa yang berbeda sudah beda, jadi agak sulit mendefinisikan karakter bangsa Indonesia itu apa?. Belum lagi jika kita masukkan pengaruh luar Indonesia, luar Timur (Barat) yang makin deras ketika dunia kita makin terglobalisasi. Paling jauh ya saya katakan mungkin Indonesia itu manusia karakter bangsa timur. Kalau saya ditanya apa yang menyebabkan karakter bangsa timur, saya harus mikir keras karena saya bukan orang ahli antropologi dan lain sebagainya, bisa saja saya jawab tapi akurasi saya nggak tahu.”

”Cuma bangsa timur itu, yang sekarang sebenarnya menurut saya sudah tidak setajam dulu, itu misalnya cenderung lebih intuitif ketimbang analitis, cenderung lebih sosial ketimbang individualistis, tapi lagi-lagi kalau ditanya sekarang itu sudah mulai berubah. Intuitif tadi ada kaitannya dengan misalnya sikap keberagamaannya. Sikap keberagaman bangsa timur itu relatif lebih mistikal ketimbang

keberagaman orang barat yang lebih rasional. Terus lebih sosial, tapi sosial ini, tidak mesti gotong royong , gotong royong itu salah satu aspek, tapi lebih sosial itu yang dimaksud kebutuhan akan. Jadi kalau kita pake teori Maslow, kategorinya Maslow, *need for affiliation* kalau nggak salah. Pokoknya kecenderungan berteman itu, itu saya kira besar. Ada orang Jawa bilang --anda di Solo pasti anda tahu artinya-- *mangan ora mangan kumpul*, makan boleh secukupnya nggak usah terlalu ini, tapi yang penting kumpul bareng-bareng. Nah, saya kira lebih sosial, lebih mistikal, lebih intuitif dan karakter ini saya kira punya implikasi yang luas diberbagai bidang. dalam pengembangan ilmu pengetahuan.”

”Maka kita bisa tertinggal dari satu segi karena lebih dominan sifat intuitif mistikal ketimbang rasional. Dalam beragama juga begitu. Tapi mungkin dalam hal survival, lebih mudah karena kita bisa lebih mudah mengandalkan tetangga, teman, keluarga. Di Indonesia ini misalnya suami isteri bekerja tidak terlalu masalah karena bisa dititipkan ke neneknya, bahkan ke tetangga. Kalau di Amerika ada seperti *baby sitter*, tapi harus bayar mahal. Jadi itu, saya kira saya masih bisa cari yang lain tapi secara garis besar itu. Tapi kalau kita bicara misalnya baik hati, orang barat tidak kurang baik hati dibanding orang Indonesia. Tolong menolong yang dibidang gotong royong, saya tidak yakin orang Indonesia lebih gotong royong ketimbang orang barat. Mereka memang tidak terlalu butuh kumpul banyak orang, tetapi kalau ada kebutuhan untuk menolong orang, saya kira makanya tadi saya bilang tidak mesti gotong royong, bisa jadi orang

barat itu lebih gotong royong, asal mereka tahu ada orang yang membutuhkan, mereka gotong royong. Tapi kalau *need of affiliation*, memang kita mungkin lebih tinggi barangkali yaa.”

Relativisme budaya seperti itu juga diakui Lukas Suwarso (Dewan Pers), ”saya terus terang tidak percaya dengan gagasan-gagasan besar seperti itu. Saya mungkin terpengaruh aliran filsafat postmodernisme. Karakter itu kan ciri-ciri individual atau seseorang jadi kalau kemudian karakter mau diatribusikan sebagai suatu bangsa maka saya rasa itu mustahil. Bangsa itu kan terdiri dari bukan saja kumpulan individu yang begitu banyak. Bangsa Indonesia itu terdiri dari kumpulan individu yang jumlahnya 210 juta setidaknya. Nah, itu kemudian dibagi-bagi lagi menjadi suku-suku bangsa. Ada Batak, Sumatera, Jawa, Sunda dan macam-macam lainnya. Bagaimana mungkin kita punya satu konsep bangsa itu satu karakter. Saya tidak percaya karena kalau kita telusuri dan amati dengan lebih elaboratif atau rinci karakter orang Batak dan orang Jawa saja sudah beda, karakter orang Bugis dan orang Madura beda. Kemudian kalau kita mau lebih turunkan lagi, kita juga tidak bisa melakukan stereotipikasi bahwa orang Madura pasti karakteristiknya seperti itu, itu kan stereotyping. Orang Madura pun juga karakternya beda-beda berdasarkan genetiknya, pergaulannya, dsbnya. Orang Madura pesisir dan orang Madura yang agak pedalaman juga beda. Jadi konsep mental, karakter kepribadian bangsa itu kan konsep-konsep yang fasis. Konsep yang walaupun bukan fasis maka ia *corporate*. Jadi ingin menyederhanakan persoalan. Bahwa seolah-olah bangsa

itu satu entitas individu, bisa direpresentasikan dalam satu individu. Misalnya individu tertentu bisa mewakili karakter suatu bangsa. Saya kira itu tidak bisa.

"Apalagi Indonesia itu satu multiwarga. Ragamnya luar biasa. Bahwa Indonesia bisa jadi suatu kesatuan bagi pengamat politik luar itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Seharusnya Indonesia itu kan terdiri dari beberapa nations. Misalnya di Eropa. Prancis itu kan Prancis saja. Inggris ya Inggris saja (Anglo Saxon). Satu etnis satu bangsa. Di Indonesia itu ada begitu ragam. Misalnya saja Papua itu kan beda secara kultural dengan Jawa. Jadi terus terang secara konseptual saya tidak percaya ada konsep karakter bangsa itu.

"Karakter itu kan dipengaruhi dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Itu teori *nature and culture*. Karakter itu kan ciri-ciri kualitas seseorang yang terkait dengan kepribadian, berarti menyangkut emosinya, intelegensinya, *attitudenya*, dan ciri-ciri yang lainnya. Menurut saya yang genetik/nature itu tidak bisa kita tolak. Sudah given. Jadi kalau kita orang tua punya anak maka karakternya tidak jauh-jauh beda dari situ. *Like father like son*. Kacang ora ninggal jalarane. Tapi kita tidak menelan mentah-mentah kalau anak itu keturunan orang pemarah pasti dia jadi pemarah. Anak orang sabar jadi sabar. Tapi genetiknya sudah tersedia di sana. Tetapi memang ada pengaruh lingkungan kemudian dimana kualitas kepribadian, karakter, attitude bisa terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, lingkungan sosial, dasebagainya. Jadi konsep nature and culture itu *fifty-fifty*-lah menurut saya. Gak bisa dikatakan kalau

genetik begitu pasti dia begitu. Kepercayaan saya begitu, saya sampai pada kesimpulan determinisme itu fifty-fifty dengan pengaruh lingkungan.

“Jadi menurut saya karakter itu kan lebih secara sosial atau lebih psikologis. Bagaimana orang itu merespon sesuatu sesuai dengan dia. Ya.. ciri-ciri motif seseorang, dia *introvert* atau *extrovert*, terbuka atau tertutup. Dia cenderung vulgar atau sabar, emosional atau menahan diri dan sebagainya. Itu kan ciri-ciri karakter. Pertama-tama basisnya ya itu. Kemudian karakter itu di bangun dari pengaruh nilai-nilai sosial, pendidikan, pengajaran, dan lingkungan pergaulan. Jadi sangat sulit menaikkan pada tataran yang umum. Itu kan konsep yang fasis. Dia tidak melihat dan menghargai keberagaman. Kalaupun bukan fasis, ya korporatis. Jadi melihat segala sesuatu bisa disatukan dan itu satu ciri itu totalitas dari individual. Terus terang saya tidak percaya itu dan menurut saya secara teoritik sekarang sudah tidak berlaku. Itu mungkin ciri-ciri konsep awal abad 20an ketika founding fathers.

“Tapi itu kan sangat sederhana. Ketika generasi sekarang melihat kompleksitas, munculnya teori-teori baru sosiologi, psikologi dan sebagainya saya kira konsep karakter bangsa itu sudah hilang. Kalau pun ada itu tinggal di wilayah anekdot-anekdot saja. Misalnya orang Polandia bego, orang yahudi pelit, begitu juga orang Arab, Orang Cina itu pedagang. Itu.. saya sih tidak percaya. Begitu juga orang Indonesia mentalnya tempe. Gak ada kayak gitu. Kalau gitu kan begini, ini kan konsep yang rasis juga ya. Dulu kan bangsa

Jerman menganggap bangsa Arya bangsa yang paling beradab. Bangsa lain itu bangsa tidak beradab akibatnya menimbulkan fasisme-nazisme. Malah lebih ekstrim. Kemudian dulu juga ada anggapan bahwa orang yang kulitnya semakin gelap peradabannya makin rendah. Itu tidak terbukti. Banyak orang kulit sawo yang juga pintar. Kita juga punya beberapa mahasiswa di Amerika yang menjadi profesor yang hebat dan juga orang negro banyak yang sangat cemerlang. Banyak juga orang kulit putih ras Arya yang perilakunya barbar.”

**Slamet Rahardjo Djarot** (Insan Film) menyatakan, "Kalau yang orang film lihat karakter orang Indonesia atau ketika kita sebut orang Indonesia. Apa sih yang muncul di benak orang film untuk bisa memberikan gambaran gitu ? Kalau orang Jepang dengan disiplinnya, kalau Indonesia apa ?

“Yang saya tahu Indonesia itu ibarat lumpur. Sesuatu masuk ke Indonesia itu nyemplung di lumpur. Berubah warna walau bentuknya sama. Masuk wayang dari India, di-*create* ulang dan beda, wayang Indonesia sama wayang India beda. Pakemnya aja yang sama gitu. Tapi pendekatannya beda, nah itu yang saya bilang. Jadi kita sangat kreatif mengadoptasi sekalipun. Terus yang kedua, apakah nyiur melambai dan padi menguning itu khas Indonesia ? Bukan. Itu juga ada di Thailand, ya kan ? Indonesia tuh pola pikir. Emang benar apa kehebatan pemimpin kita sekarang membuat pemilu tuh gak rusuh ? Kehebatan rakyat! Saya sudah memutuskan, *gue* udah capeklah yang bangsanya rame-rame terus. Udahlah mau

apa sih sebenarnya? Mau begini OK, yok kita ikutin! Lihat toleransi, kita diam gak berpikir ? enggak, berpikir kita. Kalau gak berpikir, perang kita kemarin, iya kan ?! Nah lihat, sebenarnya kalau Indonesia itu sebetulnya bukan hanya sekedar batu, bukan sekedar teluk belanga gaya Padang, Aceh atau gaya Riau ataupun juga bukan baju Bodo gaya Makassar. *We're of thinking Indonesia*. Jepang sama sipitnya dengan Korea, tapi begitu saya datang ke Tokyo dan ke Seoul, itu sangat beda! Iya, kan. Di Tokyo saya tuh berhadapan dengan orang yang super ramah. Sampai mereka, *Hai domo ! Hai domo !* berisik amat sih nih kota. Lihat bahasa mereka tuh begitu lentur untuk hal-hal yang sifatnya penghormatan. Han, jadi ketika dia menghormati bangsanya yang telah dihancurkan bangsa lain, Cuma satu : *We don't wanna die ! We want to life !* Itulah penghormatan yang sebenarnya malu ? Harakiri ! sekarang di Indonesia lebih baik malu daripada mati. Nah, jadi buat saya di dalam hal ini media tuh harus bagaimana ? Media itukan cuma jendela, media cuma alat. Nah, pertanyaannya bangsa ini mau apa ? Nah, kalau bangsa ini mau apa dimulai dengan percotohan. Kita bangsa yang mencontoh terhadap bapaknya kan? Mana ada, contohnya hari ini?

Slamet Rahardjo menilai "kunci dari semua keporakporandaan ini kan sebetulnya ketika ekonomi menjadi panglima, hukum dan social budaya menjadi sesuatu yang kalau diperlukan saja. Sehingga kita kehilangan yang namanya harga diri, harga diri bangsa. Karena segala sesuatunya di ukur dengan standar ekonomi. Selama 3 dekade memang menjurus kepada masalah-masalah dimana

masyarakat kreatif Indonesia, masyarakat agraris ini sangat kreatif dan sangat dekat dengan alam, tiba-tiba dipisahkan secara mendadak sehingga terjadi *dragging* secara psikologis baik itu secara pendekatan sosial maupun budaya.

Maka kalau sudah *dragging* sosial dan budaya, hukum sudah tak bermakna karena semua pakem-pakem budaya dan pakem-pakem sosial itu dilanggar, nah sehingga kalau terhitung hari ini kita berbicara soal media maka media itu sebetulnya hasil dari pola pikir yang mana ? setelah beberapa tahun Televisi Republik Indonesia menjadi satu-satunya stasiun televisi dan seolah-olah orang non pemerintah tidak boleh memahami televisi.”

### **III.3 Peranan Media Dalam Pembentukan Karakter Bangsa**

Para nara sumber juga sepakat bahwa media memiliki peranan besar dalam mempengaruhi karakter dan pekerti bangsa. “Sebagai orang media, saya percaya bahwa media punya peran dan kemampuan yang cukup besar atas hal itu, TV salah satunya. Karena media sebagai salah satu sarana yang langsung masuk ke dalam rumah tangga. Apakah SBY bisa jadi presiden tanpa media massa. Dia dibesarkan oleh media massa. Masyarakat simpatik pada SBY karena media. Pesan-pesan yang ingin ia sampaikan ke masyarakat pun melalui media. Media massa punya arti yang sangat vital. Jika SBY ingin merubah karakter dan pekerti bangsa pun harus lewat media massa.” Kata Satrio.

Heru Purwanto (ANTARA) mengatakan “Iya, itu pasti media itu sangat besar pengaruhnya karena ia itu media pendidikan, jadi kalau kita bicara tentang media berarti kita bicara tentang pers, di dalam teori sendiri disebutkan salah satu fungsi media adalah sumber informasi masyarakat, jadi apa yang disajikan akan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita ingin mengetahui kehidupan suatu masyarakat maka bacalah pers nya, pers adalah cermin dari kehidupan masyarakat, itu memang saling mempengaruhi.”

**Budiono Darsono (DETIK Com)** mengatakan “Bagaimanapun saya melihat bahwa media itu memegang satu peranan yang sangat penting tapi menurut saya sangat penting dalam setiap sisi-sisi atau perubahan-perubahan yang terjadi dan berkembang di dalam masyarakat. Kalau kita melihat dalam konteks Indonesia misalkan ketika dalam suatu perubahan yang sangat besar perubahan ini kan juga memaknai pada proses pembelajaran. Pembelajaran dalam arti di Indonesia adalah pembelajaran demokrasi. Demokrasi adalah sebuah peradaban kebudayaan di dalam sebuah pembelajaran ini media sangat memegang peranan yang sangat luas. Biasa Karena bagaimanapun media adalah *bridging*, jembatan antara sebuah informasi yang harus yang pada akhirnya nyampe ke public dan masyarakat kemudian publik sendiri akan mengalami satu adaptasi kemudian akan melakukan sebuah pergeseran-pergeseran karena media.

Indra Bigwanto juga mengakui, bahwa media mempengaruhi karakter. "Saya mulai dulu dari yang paling gampang. Yang paling gampang adalah perilaku mengkonsumsi produk ya kan, karena itu bisa diukur secara langsung lah ya. Apa namanya...iklan yang muncul lewat media itu mau media luar ruang atau memang media penyiaran ataupun yang lain, itu yang kemudian mengedukasi masyarakat atau perilaku konsumen untuk memilih barang. Nah, kalau barang adalah sebuah perilaku yang diambil motorik begitu ya, kan tentu saja itu awalnya di-*drive*, pikirannya sampai kemudian ia mengeluarkan sejumlah uang dan membeli produk A dan bukan produk B. Nah, jadi kalau misalnya saja orang bisa merogoh kantong, memilih A dan bukan B, itu berarti khan ininya berubah. Atau mengapa dia terus memilih produk A dan bukan produk B, itukan gara-gara itu. Gara-gara *mindset* yang ada di kepalanya akibat informasi yang diterima. Nah, tentu saja ukuran ini juga bisa berlaku sama terhadap perilaku yang lain."

Budiarto Sambazy malah menilai media tidak menyumbang terhadap perkembangan pekerti bangsa, "saya kira media kita tidak menyumbang sama sekali terhadap tegaknya karakter bangsa. Nggak ada itu sama sekali" katanya. Menurutnya, karena media sekarang telah menjadi kapitalis.

"Ideologinya kapitalisme. Hanya memenuhi selera pasar, bagaimana iklan bisa datang. Di *Kompas* pun sudah terjadi. Secara pelan-pelan kita tergerogoti oleh kepentingan-kepentingan kapitalisme. Lebih mengejar iklan daripada mengejar *quality paper*.

Seperti dulu kita sempat dikenal ya. Dulu kita tidak mementingkan halaman, 16-20 halaman cukup. Asalkan memang isinya membentuk karakter bangsa tadi. Ada unsur di dalamnya. Sekarang enggak. Timpa 50 halaman, 60 halaman. Yang penting isi terus untuk mengakomodir iklan. Iklannya separuh halaman,  $\frac{3}{4}$  halaman isinya silakan suka-suka elu. Sudah kena. Sudah lama itu. Saya kira sudah lama kalau diambil *starting point* mungkin setelah kita merasakan krismon tahun 1997. Di situ terpukul sekali kan pasar media itu? Hancur kita, termasuk Kompas. Oplahnya segitu-segitu saja, sementara iklan habis kan? Krismon. Gak ada orang pasang iklan. Setelah itu *udah*. Kita jadi *economic animal*. Cari iklan sebanyak-banyaknya, sama televisi (juga) TV7 punya Kompas sama. Yang diuber itu terus.. cerita kuning, sensasional. Itu saja yang dikejar.”

Bejo Untung menegaskan, ”jelas sekali dong media massa sangat berperan karena ...dalam teori pencitraan, media massa itu sebagai salah satu daya tarik masyarakat sehingga ketika masyarakat melihat apa yang disampaikan oleh media dia akan.... kalau kita melihat beberapa teori yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis, itu kan sangat terlihat bahwa ternyata efek dari media akan melahirkan sebuah masyarakat simulasi, artinya masyarakat akan meniru apa yang ditampilkan di media, sementara media juga mencerminkan apa yang berkembang di masyarakat, contoh lebih kongkritnya adalah media televisi yang begitu banyak menampilkan sinetron, itu diterima, diserap begitu saja oleh masyarakat sehingga itu dijadikan sebagai

model. Sementara sinetronnya sendiri tidak bisa mewakili realitas masyarakat sehingga kalau diberi kesimpulan itu potretnya sudah salah. Seharusnya yang namanya potret itu menggambarkan realitas, sekarang malah realitas yang harus mengikuti potret. Dan kalau media dalam kaitan dengan pemberitaan...misalnya orang membaca koran tentang politikus akhirnya orang kan terpengaruh juga, misalnya ketika membaca bahwa dia korup maka ia kan akan berfikir masa menteri saja boleh korup masa saya enggak boleh, dia aja aman kok. Hal-hal seperti yang seolah-olah.”

Hal yang sama diakui Stanley, “cukup besar sekali, dengan cepat iklan-iklan dan tontonan itu akan diikuti oleh anak-anak yang tidak bisa menyerap apakah ini fakta, apakah ini fiksi. Mereka menyerap itu dan masuk sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Kita bisa membedakan antara anak-anak sampai nanti agak dewasa, yang ABG-ABG sampai nanti dia dewasa, yang dewasa mungkin tidak terlalu perduli, pengaruh televisi akan kecil kecuali kita lihat lagi di lapisan ekonomi ya... lapisan ekonomi bawah akan lebih terpengaruh sementara yang tingkat atas dia bisa pilih *channel* yang dia tidak suka, yang dibawah tidak punya alternatif. Apalagi kalau kita katakan di luar Jawa atau dimana, siaran itu terbatas, dia hanya melihat 1 channel saja mulai dari pesawat itu nyala sampai pesawat itu mati, atau dia hanya mendengarkan satu siaran radio mulai dari radio itu dinyalakan sampai radio itu mati. Nah yang di metropolit apalagi kalangan menengah atas dia tidak akan terperangkap pada suguhan-suguhan yang norak dari media kita, dia bisa memilih,

banyak alternatif. Tidak suka dengan media di dalam dia bisa pilih channel luar negeri, dia tidak suka televisi bisa setel DVD, tapi yang dibawah tidak punya, dia punya ketergantungan, hiburan adalah bagian dari ketergantungan, salah satu kebutuhan pokok masyarakat kita saat ini.”

Abdullah Alamudi lebih melihatnya dari fungsi media itu sendiri. “Kalau kita lihat fungsi media itu sendiri merupakan media informasi untuk masyarakat dan merupakan media pendidikan, fungsi hiburan juga, sebagai kontrol sosial. Jadi kalau pers mengeritik kelakuan pejabat, kebijakan pemerintah, ia melakukan perintah Undang-Undang. Dalam UndangUundang dinyatakan bahwa pers harus berperan sebagai kontrol sosial, disamping ia institusi ekonomi tapi jangan sampai dalam mengejar fungsi ekonominya ini maka fungsi sosialnya terbengkalai. Maka fungsi sosial dan ekonominya berjalan sejajar, seimbang.

“Yang penting untuk kita adalah kontrol sosial berjalan tanpa peraturan-peraturan dari pemerintah. Masalahnya di KUHP sekarang ini, paling sedikit 37 pasal yang bisa melempar wartawan ke dalam penjara. Sedangkan di negara demokrasi, wartawan tidak boleh disalahkan karena pekerjaan atau karir linguistiknya. Kalau dia melakukan kesalahan maka digunakan hukum perdata berupa denda, tapi dendanya itu bersifat mendidik bukan untuk membuat orang itu bangkrut, tetapi mendidik supaya ia lebih hati-hati lagi. KUHP kita sekarang ini berlaku sejak 1917-1918 sejak jaman Belanda, dibuat untuk kepentingan Belanda. Nah ke 37 pasal ini digunakan untuk

membungkam pers yang mengeritik pemerintah Belanda, itu juga yang dipakai untuk memasukkan Bung Karno dalam penjara. Undang-Undang itu tetap dipakai pemerintah sekarang ini untuk menjajah bangsanya sendiri. Undang-Undang yang dibuat penjajah untuk menjajah Indonesia, sekarang Undang-Undang itu dipakai oleh pemerintah Indonesia bukan untuk Indonesia tapi untuk menjajah bangsa Indonesia, melarang bangsa Indonesia mengeritik pemerintahnya. Padahal salah satu tugas pers adalah menampilkan kebenaran. Timor-Timur, bekas jajahan Indonesia itu Undang-undang yang berlaku sekarang itu Undang-undang Indonesia, KUHP nya maupun KUH perdatanya, diadopsi begitu saja tapi dalam KUHPnya yang dipakai di Timor Timur semua pasal-pasal yang menentang kebebasan pers dibuang, mereka tidak menggunakan itu. Dengan kata lain negara bekas jajahan kita ini lebih demokrat cara berfikirnya daripada kita.”

#### **III.4 Tanggung Jawab Media Dalam Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa**

Sehubungan dengan besarnya potensi media mempengaruhi karakter dan pekerti bangsa maka tuntutan terhadap tanggung jawab media pun besar. Menurut Sinansari ecip, media memiliki fungsi sebagai tempat sekolah. “Media memiliki fungsi atau peran sebagai tempat sekolah. Sekolah tidak hanya di kelas juga di media, dan media diberi kesempatan untuk mendidik masyarakat. Sebab,

beberapa jam umumnya dipakai oleh remaja Indonesia dipakai dalam menggunakan media massa.”

Menurut Sinansari ecip, “Secara umum memang mengganggu, terutama televisi yang saya lihat. Berita-berita kriminalitas yang ada saat ini berpengaruh pada efek peniruan. Di banyak wilayah di Indonesia yang sudah saya kelilingi tidak ada yang ingin mempertahankan kriminalitas, pornografi dan mistis.”

Oleh karena itu, “Media hendaknya dapat menjaga moral bangsa. Kalau media dapat menjaga moral bangsa, maka media akan menayangkan tayangan-tayangan dengan bagus. Media cetaknya pun tidak menampilkan perilaku-perilaku negatif. Sebenarnya sudah ada tatanan di Dewan Pers. Peristiwa seksual misalnya itu tidak untuk umum, tidak untuk diberitakan, tidak untuk dipublikasikan dengan seenaknya, dan tidak ada yang menegur. Dewan Pers yang membuat aturan tidak menegur itu, tidak melakukan teguran, tidak membuat peringatan. Karena undang-undang tidak memberikan kewenangan yang lebih untuk itu, karena kalau dewan pers diberikan kewenangan yang lebih, nanti katanya kebebasan pers dikekang lagi. Hendaknya segala pemberitaan yang dimuat pun hendaknya menerapkan asas cek dan recek, pengecekan ulang, supaya berimbang dalam pemberitaannya.”

Sebagai contoh baik untuk isi media, Sinansari ecip menyebut sejumlah tayangan. “Zamannya Pak Harto dulu, Siti Nurbaya itu baik disinetronkan, di TVRI itu dulu ada Jendela Rumah Kita, Rumpun Bambu itu mendidik orang (pemirsanya). Rumah Masa Depan itu

menghaluskan budi pekerti masyarakat kita. Sekarang ini ada yang populer tapi agak vulgar yakni Bajaj Bajuri TransTV, populer tapi pesannya kurang kena. Kadang-kadang katanya agak kasar, menyerempet-nyerempet seksualitas.”

Sedangkan untuk tayangan-tayangan yang buruk, “Kriminalitas, seksualitas dan mistis berpengaruh buruk pada anak-anak, artinya selain Tuhan ada kekuatan yang lain. Walaupun misalnya dalam tayangan 30 menit di bagian akhir ada ayat-ayat Tuhan, tapi kan ada orang yang tidak nonton bagian akhirnya. Misalnya bagian akhir 3 menit, bagian awal 27 menit yang ditonton, akhirnya hilang.”

“Berita-berita kriminalitas yang diberitakan secara berlebihan pada gilirannya bisa ditiru oleh orang lain, misalnya curi ayam, curi mangga ditangkap, dengan bangganya masuk televisi. Sementara televisinya sendiri tidak menganut aturan jurnalistik yang baik. Harusnya kan peristiwa-peristiwa besar yang layak untuk diberitakan, bukan curi mangga apalah artinya. Tapi tiap sore hal-hal semacam itu diberitakan. Penggunaan kata-kata yang berlebihan dalam pemberitaan juga tidak betul. Misalnya kasus bom Kuningan oleh si reporter dikatakan bahwa gedung kedutaan besar Australia hancur lebur, padahal gedungnya masih berdiri dengan kokoh. Hal semacam ini kami tegur karena ini nggak benar. Yang diomongkan kan harusnya terkait dengan fakta. News value itu hendaknya diterapkan, karena ia filter, saringan. Ada faktanya, ada peristiwanya. Dan tidak semua peristiwa itu dapat diberitakan karena ada pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Kalau media menjaga moralitas ia tidak akan sembarang menampilkan gambar-gambar, foto-foto”.

“Karenanya media itu hendaknya sebagai penjaga moral bangsa. Ya perlu difilter. Apa gunanya proses *editing* itu kan untuk memperkaya, mempertajam, memperhalus. Saya pernah ketemu dengan penanggungjawab Lampu Merah, saya diskusi, saya tegur halus “Tidak teringatkah Anda dalam satu menit saja dalam 24 jam bahwa pemberitaan Anda bisa menjatuhkan moral bangsa?”. Ya mula-mula mereka tersinggung, tapi lama-lama sadar. Ideologi medianya juga apa? Ideologinya uang. Ya kalau nggak ada ideologi ya agamanya uang. Pemilik media juga harusnya sebagai penjaga moral bangsa, juga pemilik sahamnya. Sedihnya kelompok semacam ini berada dalam Group Jawa Pos, Dahlan Iskan memang betul cekatan dalam pengelolaan media tapi terus terang dalam menjaga moral masih lebih rendah. Ia boleh tersinggung ucapan saya itu, tapi nyatanya begitu. Sebab jika ia tidak lebih rendah harusnya kan dilarang itu Lampu Merah, Kasih Sayang. Tentunya yang jelek-jelek dari bagian itu harus dilarang. Masa hubungan seks dijelaskan secara detil sekali, itu kan tidak boleh.”

Untuk mengefektifkan usaha ini, “Media-media besar yang harus berperan. Mengepung dia, lama-lama dia akan mati. Kalau masyarakat yang tidak terdidik itu menyukai semacam Lampu Merah, kalau terus dibangun kesadarannya, lama-lama kan kita malu membacanya. Saya malu kok kalau pegang Pos Kota saya tentang-tentang. Dulu kita seperti pegang Suara Karya, malu kita karena

corongnya Golkar zamannya itu. Memang ini tidak langsung karena media semacam ini sudah punya massa. Nah massa ini yang harus diintervensi oleh media-media besar itu. Undang-undang pers pun harus direvisi, DPR-nya yang harus lebih berperan. Misalnya masalah pornografi akan merujuk pada UU Pornografi yang akan lahir, begitu pun dengan masalah mistik. Tidak seperti sekarang KUHP itu kan produk kolonial, misalnya masalah pornografi hukumnya hanya 45 ribu. Jadi kan seolah-olah lebih baik membayar 45 ribu melakukan kesalahan sepuluh kali.”

Dalam pandangan Satrio Aris Munandar, “Tugas media adalah mengangkat atau memberdayakan masyarakat (rakyat) yang karena sistem menjadi tidak berdaya. Dalam konteks ini, media bisa memberdayakan masyarakat yang sebetulnya bisa berdaya, tapi karena sistem struktural yang berjalan menjadi tidak berdaya, baik secara ekonomi, politik, budaya, pendidikan. Dalam konteks pemberitaan misalnya, bagaimana berita-berita politik bisa mencerdaskan rakyat, sadar politik misalnya memilih presiden (pemimpin) bukan karena satu bisa nyanyi, satu jual tampang tapi karena cerdas, punya visi, punya integritas. Kita (media) juga jangan memberi tempat kepada orang-orang yang jelas-jelas busuk (koruptor) walaupun mungkin tidak dinilai tidak berimbang. Tapi bagaimana pun kalau mau mendidik masyarakat, jangan karena kegenitan melakukan wawancaranya pun dengan panjang lebar. Saya percaya bahwa orang yang akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam adalah orang yang bersikap netral ketika krisis moral sedang

terjadi. Tidak boleh dalam krisis moral ada orang yang bersikap netral, dia harus berpihak pada kepentingan orang banyak. Misalnya kalau Indonesia diibaratkan sebagai kapal yang sedang tenggelam, maka orang tidak boleh bersikap netral sebab akan membuat Indonesia akan benar-benar tenggelam. Jadi harus berpihak. Dulu sebenarnya pers Indonesia dikenal dengan semangat pers perjuangan, semangat nasionalisme, kebangsaan dan menentang penjajahan. Tapi itu kan dulu, sekarang bagaimana menghadapi tantangan yang di depan mata seperti pengaruh globalisasi yang merusak. Menurut saya, bagaimana pun media tidak akan pernah bersikap objektif, tapi subektif. Pemilihan judul dan gambar saja sudah subjektif. Tapi bagaimana subjektif itu bisa dalam batas-batas yang normal, yang dikenal dengan kode etik jurnalistik.”

Jenis sajian media seperti apa yang mesti dipublikasikan agar memberi dampak positif pada karakter dan pekerti bangsa? “Segala pemberitaan isi media yang berkomitmen pada kepemihakan kepada kepentingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang tidak berdaya itu. Jika dikaitkan dengan news harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Pilhan-pilihan topik itu sendiri saja pada dasarnya sudah menunjukkan kepemihakan yang betul-betul berhubungan dengan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Misalnya TransTV pernah tidak meliput munas PKB yang diadakan beberapa waktu lalu karena pertimbangannya bukan kepentingan rakyat, tapi elite politik PKB saja. Secara ideologi, tv sekarang pun bisa diartikan sebagai elitis karena sering mengangkat isu-isu yang tidak

bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Sayangnya banyak wartawan dan redaktur yang juga tidak punya visi yang jelas dalam masalah pemilihan topik atau isu pemberitaan. Bahkan, ironisnya tidak sedikit para pekerja yang merasa dirinya juga sebagai bagian dari elit.”

“Para pekerja media harusnya mampu bersikap profesional berdasarkan kemampuan, baik berdasarkan pendidikan ataupun pengalaman, dan tanggungjawab atas karya sosialnya dan memiliki kesejawatan etik atau himpunan dari rekan-rekan sejawat seperti PWI, ISKI, IDI, dll. Dan semua kembali pada persoalan pembinaan para pekerja mediana, misalnya jangan hanya mementingkan persoalan rating dan materi semata dalam penyajian programnya. Faktor ekonomi seolah-olah menjadi pertimbangan utama sebagai ukuran keberhasilan suatu media, bahkan negara ini. SBY akan dinilai berhasil jika mampu menaikkan kemampuan ekonomi, kapitalisme yang diduniakan. Yang penting, bagaimana media massa bisa bertanggungjawab pada setiap isi pemberitaannya untuk kepentingan masyarakat umum.”

Sekalipun demikian menurut Satrio idak perlu pers dibelenggu. “Menurut saya, kita tidak mungkin meningkatkan karakter manusia tanpa kebebasan. Sebab, orang yang tidak bebas tidak akan mampu dituntut untuk mampu membentuk karakternya. Misalnya ada orang yang tidak mau bertanggungjawab pada sesuatu hal karena merasa dipaksa untuk melakukannya, bukan karena pilihannya. Hanya saja memang kebebasan itu seperti pisau bermata dua, di satu

sisi bisa dipakai untuk memasak namun di sisi lain bisa untuk membunuh orang. Kebebasan yang berlebihan tanpa kontrol memang bisa menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Hanya saja kita sebelumnya memang berada dalam kondisi yang tidak bisa bebas selama masa Soeharto, sehingga setelah bebas terkadang lupa mengontrol dirinya.”

Tetapi ia juga mengakui media-media kuning mengganggu karakter bangsa. “Memang terdapat sebagian media massa pinggiran mengganggu karakter dan pekerti bangsa. Misalnya seperti lampu merah dan pos metro yang dalam pemberitaannya seolah-olah lebih mementingkan persoalan seksualitas dan pornografi. Hal semacam ini yang memerlukan pengaturan lebih baik ke depannya, termasuk masalah profesionalisme media tersebut. Apalagi kalau kedua media semacam ini dapat dibaca oleh hampir semua orang tanpa batasan yang jelas. Dan ini tentu saja dapat menimbulkan keresahan di masyarakat kita. Sudah saatnya media kita pun berbudaya dalam setiap pemberitaannya.”

**Syaiful Rahman** (IJTI) menyetujui bahwa media harus punya tanggung jawab sosial. “Jadi artinya jangan kemudian mengatakan kebebasan pers atau dibidang jurnalisme, diartikan nggak punya etika semacam itu, nggak bisa begitu juga kan. Kita bebas ...cobalah kita pakai ilustrasi yang gampang aja, orang bebas lari di jalan raya, kalau misalnya kepingin selamat kan nggak harus menabrakkan ke mobil, harus melihat situasi, harus melihat kemana juga kan. Apakah kita kemudian mengatakan wah nggak bebas, bukan begitu. Anda bebas

berteriak-teriak, kalau tetangganya kemudia menjadi terganggu, apakah kemudian anda kemudian kan mengatakan tidak bebas, nggak juga. Anda bebas ngomong, silahkan ngomong, teriak-teriak sebebas-bebasnya, sampai habis kerongkongannya, apakah anda akan mau melakukan itu? Kan sesuai dengan kebutuhan anda. Anda kebutuhannya apa sih? Kebutuhan kita melakukan tugas jurnalistik kan hanya sekedar mengingatkan ya kan, *control social*, itu. Kalau misalnya itu tercapai, kenapa harus lebih dari itu. Kenapa harus sampai berakibat terciptanya korban baru dari sebuah pemberitaan, kan nggak bisa begitu... Jadi itulah tuntutan hati nurani, tanggung jawab sosial seorang jurnalis kepada masyarakat. Wong punya tanggung jawab membuat masyarakat ini baik. Persoalannya kan tinggal sekarang, apakah setiap jurnalis, setiap lembaga penyiaran memiliki watak atau nurani semacam itu. Inikan silahkan saja tanya kepada masing-masing pelaku .kan. Nah, IJTI sebagai organisasi yang biasa memberikan peringatan semacam itu, ya memang tugasnya ngingetin kepada teman-teman jurnalis, “hei kawan-kawan kalau *you* datang ke tempat peliputan semacam ini, hati-hati”, hanya begitu kan. Kalau misalnya anda memberitakan berita semacam ini, Pakailah kode etik, Pakailah berita yang berimbang, tidak menghakimi, begitu. Apabila ada berita kejahatan sex, ya hati-hati, korban nggak usah dimunculkan mukanya, ya disamarkan, namanya samarkan, apalagi korbannya dibawah umur. Itukan etika-etika yang harus ditaati.”

Heru Purwanto, menambahkan, “Seharusnya jadi media harus menyadari bahwa apa yang disampaikan akan berdampak pada masyarakat, tapi persoalannya adalah apakah media yang sekarang sudah sadar akan hal itu? Itu agak sulit karena begitu kurang tanggung jawab pers, informasi tidak bisa dikontrol oleh pemerintah jadi bebas, sama dengan di negara lain yang lebih dahulu kebebasan persnya, media itu tergantung kembali pada pemiliknya, misinya untuk apa? Pada target bisnisnya, pasarnya, kalau enggak lakukan bagaimana ia bisa hidup? Ada pers yang lebih mengejar itu, kemudian dengan idealisme, menceritakan kekerasan. Memang seharusnya pers punya tanggung jawab, apakah kita bisa menanamkan untuk sekarang ini... jadi yang kasihan ya... kadang-kadang masyarakatnya sendiri.”

Jenis berita seperti apa yang harus dipublikasikan supaya memberikan efek positif terhadap karakter dan budi pekerti bangsa? “Sepanjang berita itu tidak menyangkut demoralisasi, tidak mengarah pada pornografi, kekerasan, tapi masalahnya apa mungkin? Karena pada sisi lain berita tentang kekerasan, berita tentang kriminalitas itu laris. Kadang mereka mencari juga itu, kalau seandainya masyarakat tidak mau, enggak ada tuh koran-koran yang pornografi, masyarakat memang mau. Jadi barangkali prinsipnya bukan bagaimana kita mengendalikan media, banyak faktor lain, bagaimana masyarakat memiliki karakter bukan hanya karena media, ada faktor lain yang harus dipikirkan juga. Jadi kembali lagi dimulai dari keluarga,

pendidikan agama dalam keluarga. Media akan mempengaruhi tapi tidak akan sedasyat kalau dia tidak kuat.” Ujar Heru.

Stanley berpendapat, “media harus membela pikiran yang menurut mereka benar, media kan punya logika sendiri sebenarnya, minimal dia itu independen, tidak punya kepentingan apapun. Misalnya melihat Samson dan Goliat, raksasa dan orang kecil bertempur masa media tidak boleh membela orang kecil? Karena secara naluri media pasti membela yang *under dog*, bukan berarti dia tidak boleh membela lantas ia meliput ‘ini perang si besar dengan si kecil’, tidak seperti itu, silahkan. Tapi yang menurut mereka paling baik, karena banyak media yang kemudian dibayar oleh kekuasaan, oleh orang yang punya uang, orang politik, nah ini yang tidak boleh. Jadi netral adalah netralitas yang diupayakan oleh ruang redaksi, jadi itu sebuah keniscayaan, tidak ada yang absolut. Karena dalam rapat redaksi kan biasanya banyak suara, mereka memutuskan sendiri. Itulah keputusan terbaik yang harus dijalankan asal jangan si pemiliknya datang ‘kalian jangan tulis ini! Harus membela ini karena dia telah membantu perusahaan kita’.”

Bejo Untung juga mengatakan bahwa media harus memihak pada publik. “Media itu harus mengutamakan kepentingan publik, harus memihak, tidak hanya berita-berita hiburan, kehidupan artis, tapi ada hal lain yang lebih mendasar misalnya pelayanan publik dalam bidang transportasi, listrik, air. Artinya bahwa hal itukan yang sehari-hari dirasakan masyarakat dan mau tidak mau itu yang

dirasakan, bagaimana pelayanan publik kepada mereka, itulah yang harus diberitakan oleh wartawan.”

Dan untuk itu harus didukung oleh kebebasan media. “Sebenarnya yang namanya kebebasan media pada dasarnya sangat menguntungkan karena masyarakat terhadap informasi yang ada, kemudian masyarakat juga bisa ikut mengontrol pemerintahan yang ada. Informasi yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah korup itu bisa diekspos. Tetapi masalahnya dalam keadaan seperti ini tidak serta merta wartawan ini jadi lebih punya tanggung jawab dalam memberitakan mereka menabrak pagar-pagar, terlalu menyentuh kehidupan pribadi, membuat berita yang tidak seimbang, tanpa konfirmasi. Harapan itu yang patut kita pertanyakan, karena kita bekerja untuk menentang .”

Menurut Indra Bigwanto, “Media harus memiliki kapasitas yang sangat luar biasa bagusnya. Jadi dari segi kemanusiaan, dari segi intelektual, dari segi *emotional quality*,. Dia harus menjadi sangat hebat karena aliran informasi yang dia sampaikan itu, bisa menjadi informasi yang baik menjadi racun, gitu khan. Atau racun disini juga bisa menjadi seolah-olah madu. Nah, si pipa inikan sebetulnya tidak boeh mereduksi dan menambah-nambahkan, sebetulnya seperti yang saya katakan tadi bahwa disini ada kejadian busuk, dia harus sampaikan tentu dengan bermartabat. Tapi yang paling penting juga itu tadi yah... bahwa masyarakat juga memiliki keseimbangannya sendiri untuk menyaring. Dan saya percaya betul itu.”

Tetapi Lukas Suwarso kurang setuju dengan tuntutan akan tanggung jawab sosial media. Ia lebih menginginkan media mengatur dirinya sendiri. Itu normatif ya. "Itu harapan-harapan teoritik. Tetapi kalau kita masuk pada dataran realitas, media itu kan entitas bisnis. Bisnis itu logikanya kan dia harus laku. Kalau dia ingin laku dia harus punya pangsa pasar. Sesuai dengan selera pasar. Dikotominya kan selalu bahwa selera pasar itu buruk. Gak selalu itu. Kan begini. Interaksinya kan memang seperti itu. Apakah media mempengaruhi masyarakat atau masyarakat mempengaruhi media. Itu seperti gilingan, kayak roda industri gitu. Satu berputar maka yang lain berputar gantian. Jadi saling mempengaruhi. Tidak ada faktor yang lebih dominan, apakah media atau masyarakat? Itu kayak *yin* dan *yang* aja. Timbal-balik. Jadi misalnya soal selera masyarakat. Selera masyarakat kan sesuatu yang tidak konstan. Kalau sekarang pasar selernya dengan yang mistik-mistik, atau kriminal yang vulgar gitu. Ini kan saya kira sementara saja. Bisa jadi selera ini berubah. Dalam arti bisa lebih ekstrim, bisa lebih soft. Jadi media-media yang hanya mengikuti selera pasar dan tidak kemudian secara pintar membentuk selera pasar, itu dia akan mati. Karena pasar pada titik tertentu akan jenuh, bosan. Contohnya Inul, sekarang lagi *in*. Kita boleh tebak, tahun 2006 Inul mungkin sudah gak dikenal lagi kecuali Inul bisa memformulasikan goyang dangdut baru yang masih membuat orang senang dia. Jadi kembali pada karakter bangsa, saya menyebut itu konsep yang fasis, walaupun bukan feodal. Padahal kalau kita hidup di era sekarang, kita harus menggunakan konsep yang lebih demokratis. Demokratis artinya keberagaman. Dengan keberagaman, kita tidak bisa memformulasikan satu teori

tunggal yang menjelaskan kompleksitas persoalan yang rumit ini. Saya tidak percaya. Misalnya, karakter orang Timor Timur karena sudah berpisah dengan Indonesia, apakah sekarang sudah berubah? Baru lima tahun lalu dia jadi bagian bangsa Indonesia. Apakah karakter bangsa Indonesia itu seperti Soeharto dengan militerismenya? Apakah seperti Gus Dur? Nah ini kan sebenarnya karakter ingin direduksi seperti persoalan gaya politik pada kepemimpinan masa tertentu misalnya. Maunya Soeharto kan karakter bangsa Indonesia, yang selalu digembor-gemborkan melalui media yang dikembangkan oleh Harmoko kan, bangsa yang Pancasila, bangsa yang ramah. Ya.. ramah seperti apa? Pancasila seperti apa? Tidak jelas. Konsep yang banal, terlalu sederhana, terlalu dangkal.”

Jadi apakah sebaiknya media selalu mengikuti selera pasar? “Ya.. Terserah. Itu kan entitas bisnis. Tapi Kalau Anda seorang pengelola media yang jeli, Anda harus ikuti selera pasar tapi pada saat yang sama harus cukup inovatif untuk membentuk selera pasar. Ini kan *American Idol* ditiru dimana-mana, direplikasi. Tapi kita tunggu aja, 2-3 tahun lagi, orang mungkin sudah tidak tertarik lagi, orang butuh sesuatu yang baru lagi. Maka harus ada inovasi baru. Sekarang *American Idol* di Indonesia sudah ada yang versi AFI, KDI, macam-macam kan. Semua media membentuk apa yang disebut *reality TV* kan. Tapi kan *reality TV* kan fenomena yang baru. Kita tunggu aja, paling sebentar lagi orang juga sudah bosan, membutuhkan sesuatu yang baru.”

## **BAB IV**

### **INTERPRETASI, KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.1 Interpretasi**

##### **A. *Karakter dan Pekerti Bangsa: Bukan Sekadar Sopan Santun....***

Dari hasil wawancara mendalam, semua nara sumber sepakat bahwa karakter dan pekerti bangsa kita sudah mengalami penurunan dan kemerosotan. Secara individual, penghargaan terhadap orang tua maupun dosen merosot. Dibandingkan dengan zaman dulu, misalnya pada zaman Orde Baru, tingkat kesantunan masyarakat kita sudah menurun.

Lebih dari itu, keadaannya sudah terpuruk sekali dimana perilaku masyarakatnya sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Masyarakat kita cenderung mengabaikan peraturan dan adat kesopanan. Bila menghadapi masalah, cara yang ditempuhnya adalah dengan jalan kekerasan, tepatnya mengamuk. Jika dipercaya memegang jabatan, pasti melakukan korupsi. Kalau diminta melakukan sesuatu sesuai prosedur ada kecenderungan tidak disiplin. Sehingga tak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat kita sudah mengalami dekadensi moral.

Sebagai bangsa, pekerti bangsa kita juga jauh dari harapan jika dikaitkan dengan cita-cita kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, karakter bangsa yang kita cita-citakan adalah bangsa bangsa yang mandiri, punya rasa tanggung jawab, bangsa yang tidak tergantung kepada bangsa lain. Sementara kenyataannya sekarang terutama generasi mudanya sudah kehilangan suka meniru saja apa yang datang dari luar, tanpa menyaringnya sehingga menghasilkan sebuah kepribadian yang kurang bagus.

Secara keseluruhan bangsa kita sedang mengalami disorientasi. Sekarang bangsa Indonesia sedang berubah luar biasa yang tak jelas kemana arahnya sekalipun hal itu juga merupakan sesuatu yang tidak bisa terbendung karena adanya globalisasi. Dewasa ini perubahan-perubahan nilai berlangsung begitu cepat di mana orang tidak sempat melakukan penyesuaian diri dengan baik. Ditambah lagi dengan ketiadaan suri teladan dari para tokoh masyarakat. Kalangan tokoh masyarakat kita tidak menunjukkan visi yang jelas mau diarahkan ke mana bangsa kita.

Disorientasi bangsa kita juga semakin besar karena lemahnya penegakkan hukum. Keadilan dan kemanusiaan tidak diperhatikan. Hal ini juga sebagai akibat dari tekanan pemerintah terhadap moralitas masyarakat. Sewaktu Orde Baru berkuasa, kedewasaan politik dibatasi; pers dihambat dan kebebasan berekspresi diperkosa. Ketika itu, orang tidak dididik dan tidak dibiasakan dalam lingkungan di mana bisa berinteraksi secara adil dan terbuka.

Dari temuan ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan karakter dan kepribadian bangsa bukan sekadar dari sopan santun; melainkan moralitas bangsa untuk hidup sesuai tuntunan hukum, peraturan, dan adat kebiasaan yang baik, sebagai bangsa yang beradab. Jika dikatakan bangsa ini sedang mengalami disorientasi dan dekadensi, hal itu dikaitkan dengan semangat membangun bangsa dari keterpurukan moralitasnya, dan kenyataannya bangsa masih jauh tertinggal.

Temuan ini sesuai dengan definisi karakter dan pekerti bangsa yang dipaparkan oleh para nara sumber. Ciri-ciri umum semua masyarakat maju (baca, bangsa yang memiliki karakter yang baik) adalah ramah dan lemah-lembut. Jika dikaitkan dengan kondisi karakter bangsa kita yang suka dengan kekerasan (mengamuk) dan tidak menghargai peraturan yang berlaku, maka bisa dikatakan bangsa kita masih jauh dari maju.

Ciri-ciri spesifik (pokok) lain dari bangsa yang maju adalah karakternya yang cepat bangkit dari keruntuhan seperti Jepang, Korea, Taiwan, Thailand. Bahkan Malaysia sebagai bangsa Melayu, termasuk bangsa yang karakternya maju karena mereka cepat bangkit dan cepat mapan secara ekonomi. Malaysia berani menolak bantuan IMF dan mematok nilai tukar kurs dollar sendiri dan tidak tergantung dengan Barat. Dalam bidang pendidikan, Malaysia juga memiliki karakter sebagai bangsa maju karena berani melakukan investasi kemanusiaan.

Karakter bangsa yang maju (beradab) juga antara rajin bekerja, jujur, terus terang, tidak pendendam, selalu melihat ke masa depan, tahu

cara memperbaiki diri, setiap individu warga bangsanya mencari rizki yang halal. Jadi sikap dan mental bangsa itu bersih; cenderung ke arah kebaikan.

Demikianlah, sekali lagi, yang disebut karakter dan pekerti bangsa itu sangat terkait dengan moralitas yang dimiliki para warga bangsa. Di dalamnya bukan hanya ada sopan santun, tetapi semangat, orientasi hidup dan etos kerja. Karakter di sini bisa diterjemahkan sebagai watak dimana watak itu dibentuk oleh sistem moralitas. Begitu eratnya hubungan antara ketiganya, kadang-kadang karakter, watak, moral, itu sering diidentikkan satu sama lain.

### ***B. Lintas Batas Karakter dan Pekerti Bangsa: Pengaruh Global terhadap Perkembangan Karakter dan Pekerti Bangsa***

Hal penting lainnya dari temuan ini adalah sebuah kenyataan bahwa karakter bangsa itu selalu mengalami perkembangan. Melihat karakter dan pekerti bangsa sendiri tidak bisa kaku. Dewasa ini kita agak sulit untuk membuat batas antara karakter bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, seperti karakter bangsa Thailand dan bangsa Philipina, misalnya. Pengaruh globalisasi kini sudah merembes bahkan sudah sampai ke desa-desa kita. Bahkan untuk sekadar membedakan karakter antara bangsa timur dan bangsa barat, dimana bangsa Indonesia itu termasuk ke dalam karakter bangsa timur, bukanlah yang mudah dewasa ini.

Perbedaan bangsa Timur dari Barat sekarang sudah tidak setajam dulu. Dulu bangsa Timur cenderung lebih intuitif ketimbang analitis, cenderung lebih sosial ketimbang individualistis. Tapi kini sudah berubah juga, dan tinggal satu yang bisa membedakannya. Keragaman bangsa Timur itu lebih intuitif mistikal ketimbang rasional; serta satu lagi adalah *need of affiliation*, bangsa Timur lebih tinggi dari bangsa Barat.

Dengan kata lain kita tidak bisa memastikan apa yang disebut karakter bangsa itu. Sifatnya cenderung individual dan agak sukar atau tidak relevan jika diatribusikan sebagai suatu bangsa. Apalagi untuk kondisi bangsa Indonesia yang terdiri suku-suku bangsa. Belum lagi nilai-nilai yang masuk ke masuk ke Indonesia itu seperti tenggelam ke dalam lumpur sehingga berubah warna kendati mungkin bentuknya sama. Sebagai contoh wayang yang masuk dari India. Ia direka ulang sehingga bentuk dan pakemnya beda dari aslinya.

Hal itu artinya, karakter bangsa itu tidak bersifat tunggal dan cenderung berubah-ubah. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan karakter bangsa –yang diwakili individu-individu-- antara lain adalah faktor agama, kondisi alam, geografi, profesi, pendidikan, media massa termasuk buku dan bahan bacaan lainnya.

Secara sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter dan budi pekerti bangsa, secara sederhana dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Atau secara politik dapat disebutkan, pembentukan karakter bangsa itu adalah faktor kultural

dan struktural. Sistem politik juga mempengaruhi karakter bangsa. Ternyata kemerdekaan dalam bidang politik menentukan karakter dan pekerti bangsa disamping, kehidupan ekonomi dan budaya.

***C. Media dan Pembentukan Karakter dan Pekerti Bangsa: Disfungsinya Lebih Terlihat daripada Fungsinya.***

Para nara sumber juga umumnya sepakat bahwa media, terutama TV, memiliki peran dan kemampuan yang besar dalam mempengaruhi karakter dan pekerti bangsa. Media memiliki fungsi atau peran sebagai tempat sekolah. Media memiliki kesempatan yang luas untuk mendidik masyarakat. Bahkan media lebih banyak dikonsumsi ketimbang tempat belajar itu sendiri, yakni sekolah, oleh remaja Indonesia.

Dalam kenyataannya media langsung masuk ke dalam rumah-rumah tangga. Setiap saat TV dapat ditonton oleh semua anggota keluarga. TV telah menjadi sekolah anak-anak, remaja, orang dewasa dan para manula. Sementara itu, dewasa ini berita-berita kriminalitas, pornografi dan mistis memenuhi banyak layar kaca, sehingga dikhawatirkan menimbulkan peniruan. Hal yang seharusnya dilakukan media dalam menyumbang terhadap tegaknya karakter bangsa, tidak dilakukan dengan baik. Malah sebaliknya berpotensi menimbulkan efek penghancuran terhadap karakter bangsa.

Hal ini beralasan karena media bisa melahirkan efek simulasi terhadap masyarakat; artinya masyarakat akan meniru apa yang ditampilkan di media, sekalipun media juga mencerminkan apa yang berkembang di masyarakat. Sebagai salah satu buktinya, adalah cepatnya anak-anak mengikuti iklan-iklan dan tontonan tanpa membedakan apakah itu fakta ataukah fiksi. Mereka menyerapnya dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Iklan itu mengedukasi masyarakat dalam hal perilaku konsumen untuk memilih barang.

Berdasarkan argumentasi para sumber, fungsi sosial media yang empat<sup>1</sup>, yaitu: (1) pengawasan lingkungan, (2) korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, (3) transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan (4) hiburan, tidak berjalan dengan baik. Media kurang melaksanakan fungsi informasi, dalam arti menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia yang berguna untuk inovasi, adaptasi, dan kemajuan masyarakat.

Fungsi informasi yang dilaksanakan oleh media, khususnya TV, minim sekali. Penayangannya tidak dalam kerangka mengekspos budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (*subculture*) serta perkembangan budaya baru. Apalagi yang bersifat meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Alih-alih meredakan

---

<sup>1</sup> Wright, Charles R, *Mass Communication A Sociological Perspective*, (third edition), McGraw Hill, 1986, hal. 4-5.

ketegangan sosial, program hiburannya kerap menimbulkan ketegangan sosial.

Menurut para nara sumber, penyebab itu semua karena kapitalisme telah masuk ke dunia media. Ideologi kapitalisme media telah menyebabkan media hanya berpikir tentang selera pasar guna memperoleh iklan. Dengan adanya unsur kapitalisme dalam media (TV) telah menyebabkan aspek disfunksinya lebih terlihat daripada fungsi sosialnya.<sup>2</sup> Akibat kapitalisme, fungsi media dalam mendidik masyarakat menjadi berkurang. Hal ini sekali terlihat dari acara-acara TV yang lebih banyak diisi dengan tayangan kekerasan, pornografi, dan mistik.

Dalam konteks ini, para nara sumber umumnya menganggap media memiliki kekuatan yang sangat besar (*powerful effect*) dalam mempengaruhi masyarakat.<sup>3</sup> Pengaruh media dianggap sangat besar. Media dinilai memiliki fungsi pendidikan, disamping sebagai sumber informasi masyarakat, sehingga hal-hal yang disajikan media dipandang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Walhasil, tayangan kekerasan dianggap telah menyebabkan terjadinya cara berpikir mencari jalan pintas dalam mengatasi sebuah masalah. Demikian pula tayangan mistik dinilai telah menumpulkan akal sehat masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Halnya dengan pornografi baik, di TV, koran, majalah, tabloid, dituding telah menurunkan moralitas masyarakat.

---

<sup>2</sup> Right, *ibid*, hal. 15-17.

<sup>3</sup> Baran, Stanley J dan Dennis K. Davis, *Mass Communication Theory*, Wadsworth, 2000.

**D. Tanggung Jawab Media dalam Pembentukan Karakter dan Pekerti Bangsa: Cenderung Komunitarian tetapi Ingin Tetap Bebas**

Yang menarik, para nara sumber melihat media memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan karakter dan pekerti bangsa. Merupakan tugas media untuk mengangkat atau memberdayakan masyarakat (rakyat). Media harus bisa memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya. Ketika struktur kekuasaan membuat masyarakat tidak berdaya, baik secara ekonomi, politik, budaya, pendidikan, media harus bisa memberdayakannya. Berita-berita politik, misalnya harus bisa mencerdaskan rakyat secara politik. Media juga jangan memberi tempat kepada orang-orang yang jelas-jelas busuk (koruptor) walaupun mungkin beritanya dinilai tidak berimbang.

Demi kepentingan bangsa, seseorang tidak boleh bersikap netral ketika terjadi krisis moral. Dalam situasi krisis moral tidak boleh ada orang yang bersikap netral. Dia harus berpihak pada kepentingan orang banyak. Kalau Indonesia diibaratkan sebagai kapal yang sedang tenggelam, maka orang atau pers tidak boleh bersikap netral sebab akan membuat Indonesia akan benar-benar tenggelam.

Dari segi fungsi media, para nara sumber umumnya menempatkan media dalam kerangka *communitarian ethics*.<sup>4</sup> Bahwasanya media harus mengutamakan kepentingan orang banyak

---

<sup>4</sup> Merrill, John C., *Journalism Ethics, Philosophical Foundations for New Media*, St Martins Press, 1997

(*groupist*). Media harus memandang setiap orang adalah setara dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama (*egalitarians*), tidak menganggap khalayak sebagai penonton pasif saja.. Media harus memperhatikan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain lebih daripada diri sendiri (*altruists*), bukan hanya mengejar keuntungan (kapitalistik).

Menurut beberapa nara sumber media harus mengutamakan kepentingan publik, harus memihak pada kepentingan publik; tidak hanya mementingkan berita-berita hiburan dan kehidupan artis demi memperoleh rating. Ada hal lain yang lebih mendasar untuk diberitakan misalnya pelayanan publik dalam bidang transportasi, listrik, air. Sebab masalah-masalah itulah yang sehari-hari dirasakan masyarakat. Tentang pelayanan publik itulah yang harus diberitakan oleh wartawan.

Dalam hal tujuan sosial yang mesti dicapai oleh media para nara sumber umumnya sepakat dengan sikap *utilitarian ethics*. Etika ini mengasumsikan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang baik untuk orang terbanyak, *greatest happiness to the greatest number*. Media massa menurut etika ini harus lebih mementingkan orang banyak dari pada kepentingan golongan minoritas. Tayangan-tayangan yang mengganggu kepentingan orang banyak, dan hanya mengejar keuntungan saja, jelas bertentangan dengan sikap altruisme media.

Kenyataannya masih ada saja media yang belum berorientasi utilitarian. Orientasi pemberitaannya adalah uang. Ideologi mediana atau agamanya adalah uang. Pemilik media dan pemilik sahamnya

hanya berorientasi pada uang. Kondisi macam ini antara lain berada dalam Group Jawa Pos. Para pengelolanya betul-betul cekatan dalam mencari uang tapi sangat rendah dalam menjaga moral.

Pada tataran apa yang harus dilakukan media, para nara sumber tampaknya sepakat dengan sikap *deontological ethics*. Bahwasanya media sebaiknya mengikuti aturan-aturan formal yang berlaku. Agar media dianggap bertanggung jawab maka dikatakan harus mengikuti etika, dan sebaliknya jika ia melanggarnya maka ia akan dianggap tidak mempunyai etika. Betapa media mesti melakukan *deontological ethics* dapat dilihat dalam pendapat para nara sumber yang cenderung menggunakan kata “harus” yang bersumber pada aturan formal tertentu. Aturan yang diacunya antara lain peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers untuk media cetak. Dewan Pers yang membuat aturan untuk pers maka Dewan Pers juga yang mesti menegur jika pers itu melanggar peraturan.

Secara deontologis umumnya nara sumber berpendapat bahwa para pekerja media harusnya mampu bersikap profesional berdasarkan kemampuan, baik berdasarkan pendidikan ataupun pengalaman, dan tanggungjawab atas karya sosialnya. Para pekerja media harus memiliki etik kesejawatan atau himpunan etik dari rekan-rekan sejawat seperti PWI, ISKI, IDI, dll. Media massa harus bisa bertanggungjawab pada setiap isi pemberitaannya untuk kepentingan masyarakat umum.

Namun demikian media harus tetap bebas. Tanggung jawab sosial yang dimiliki media hendaknya tidak membelenggu kebebasan

pers atau dibidang jurnalisme. Untuk pengembangan karakter dan pekerti bangsa, kita tidak mungkin mewujudkannya tanpa kebebasan. Sebab, orang yang tidak bebas tidak akan mampu dituntut untuk mampu membentuk karakternya. Kebebasan media itu pada dasarnya sangat menguntungkan karena masyarakat menjadi tahu mengenai informasi yang ada, kemudian masyarakat juga bisa ikut mengontrol situasi yang ada. Informasi yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah yang korup bisa diekspos dan masyarakat bisa ikut mengontrolnya.

Hanya saja memang kebebasan itu seperti pisau bermata dua, di satu sisi bisa dipakai untuk memasak namun di sisi lain bisa untuk membunuh orang. Para wartawan tidak serta merta menjadi lebih punya tanggung jawab dalam memberitakan kebobrokan pemerintah. Mereka cenderung menabrak rambu-rambu, terlalu menyentuh kehidupan pribadi, membuat berita yang tidak seimbang, tanpa konfirmasi.

Itu artinya kebebasan media juga mesti dibatasi. Kebebasan yang berlebihan tanpa kontrol memang bisa menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kebebasan yang dimiliki koran-koran kuning. Sebagian media massa pinggiran mengganggu karakter dan pekerti bangsa. Misalnya seperti *Tempo Merah* dan *Pos Metro* yang dalam pemberitaannya seolah-olah lebih mementingkan persoalan kekerasan, seksualitas dan pornografi. Kedua media semacam ini dengan bebas dapat dibaca oleh hampir

semua orang tanpa batasan yang jelas sehingga potensial dapat menimbulkan keresahan di masyarakat kita.

Padahal peristiwa kriminalitas yang diberitakan secara berlebihan pada gilirannya bisa ditiru oleh orang lain. Ironisnya lagi, peristiwa kriminalitas “kecil” seperti kasus mencuri ayam dan mencuri mangga yang masuk TV. Tiap pagi dan sore berita-berita semacam itu dapat kita tonton, yang kerap kali ada perasaan bangga dari pelakunya karena masuk televisi. Seharusnya, hanya peristiwa-peristiwa kriminalitas besar saja yang layak untuk diberitakan.

Penggunaan kata-kata oleh media kita kadang berlebihan dalam pemberitaannya. Misalnya dalam memberitakan kasus bom Kuningan dikatakan bahwa gedung kedutaan besar Australia hancur lebur, padahal gedungnya masih berdiri dengan kokoh. Hal semacam ini jelas tidak benar. Sebab tidak sesuai dengan fakta. Tidak semua peristiwa itu dapat diberitakan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau media menjaga moralitas ia tidak akan sembarang menampilkan gambar-gambar dan foto-foto.

Untuk menciptakan situasi utilitarian dan komunitarian, media-media besar harus berperan. Koran-koran pinggir itu harus dikepung oleh media-media besar agar mati secara perlahan-lahan. Media besar harus mendidik masyarakat agar tumbuh kesadarannya sehingga merasa malu membaca media semacam Lampu Merah. Disamping itu, Undang-undang Pers pun harus direvisi. Para anggota DPR harus berperan lebih besar. DPR harus mendukung

ditelorkannya UU Pornografi. Begitu pun dengan masalah mistik, DPR harus dapat memberi perhatian pada tayangan macam ini.

Sebagai bagian dari tanggung jawab komunitariannya, media harus dapat memilih topik-topik yang betul-betul berhubungan dengan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Isi media harus membela kebenaran; harus independen, tidak disertai kepentingan apapun. Media harus memihak pada si lemah dan melawan si kuat yang menindas. Media membela kemanusiaan. Karenanya media harus menjadi sangat hebat karena informasi yang dikandungnya sangat ampuh.

Tetapi satu nara sumber, yakni Lukas Suwarso, kurang setuju dengan tuntutan yang bersifat deontologis untuk media. Ia lebih cenderung menganut etika subjektifis. *Subjective ethic* percaya bahwa tindakan manusia adalah tidak rasional. Tindakan itu lebih bersifat spontan, dan didasarkan atas insting, atau spiritual. Seseorang mempunyai semacam cita rasa moral yang mendorong dia untuk melakukan hal yang benar. Dia bebas melakukan apa saja.

Dari kacamata subjektifis, media itu adalah entitas bisnis yang harus laku. Kalau media ingin laku harus punya pangsa pasar dan sesuai dengan selera pasar. Secara subjektifis, dikotomi yang menganggap selera pasar itu buruk tidak benar. Dalam realitasnya, media mempengaruhi masyarakat atau masyarakat mempengaruhi media. Jadi saling mempengaruhi. Tidak ada faktor yang lebih dominan, apakah media atau masyarakat.

Jadi biarkan pasar yang menentukan arah media. Kalau sekarang pasar sedang menyukai acara-acara mistik-mistik atau kriminal yang vulgar, hal itu secara subjektivis bersifat sementara saja. Jadi biarkan media mengikuti selera pasar, sebab jika tidak pintar membentuk selera pasar, media itu akan mati.

Dalam pandangan subjektivis, setidaknya diwakili Lukas Suwarso, pembicaraan karakter bangsa bersifat fasis. Padahal kalau kita hidup di era sekarang, kita harus menggunakan konsep yang lebih demokratis. Demokratis artinya keberagaman. Dengan keberagaman, kita tidak bisa memformulasikan satu teori tunggal yang menjelaskan kompleksitas persoalan yang rumit ini.

## **IV.2 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan interpretasi terhadapnya, dapat ditarik lima kesimpulan utama:

1. Karakter dan pekerti bangsa Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan, baik dalam level individual maupun dalam level bangsa. Dalam berbagai lapangan kehidupan, masyarakat kita cenderung mengabaikan peraturan, adat istiadat, dan sopan santun. Prilaku kekerasan dan seks, sikap yang tidak disiplin, dan tindakan korupsi adalah di antara sejumlah indikator dekadensi moral masyarakat kita. Selain karena pengaruh globalisasi, perubahan yang cepat di dalam

negeri juga membuat masyarakat kita mengalami disorientasi dan gangguan kepribadian bangsa.

2. Yang dimaksud dengan karakter dan pekerti bangsa adalah segala sikap dan perilaku yang memajukan bangsa, bukan sebatas sopan santun dan hormat pada orang tua/yang dituakan. Karakter dan pekerti yang memajukan sebuah bangsa itu adalah karakter yang cepat bangkit dari keruntuhan, rajin bekerja, jujur, terus terang, tidak pendendam, selalu melihat ke masa depan, tahu cara memperbaiki diri, setiap individu warga bangsanya mencari rizki yang halal, sikap dan mental yang bersih, cenderung pada kebaikan, disamping ramah, lembut dan sopan. Dalam karakter yang bersifat memajukan itu terdapat semangat, orientasi hidup dan etos kerja yang kuat yang menjadi watak dan moralitas bangsa itu. Tatkala melihat karakter dan pekerti bangsa itu juga hendaknya tidak statis dan tunggal melainkan secara harus dinamis dan terbuka. Dewasa karakter dan pekerti bangsa merupakan hasil interaksi dengan bangsa-bangsa lain dalam relativisme kebudayaan.
3. Bagi kalangan media, basis dari pembentukan karakter dan pekerti bangsa adalah kebebasan media. Karakter dan pekerti bangsa Indonesia tidak mungkin terwujud tanpa kebebasan media. Dengan kebebasan media, masyarakat menjadi tahu apa yang terjadi di tengah bangsanya dan bisa ikut mengontrol situasi sosial yang sedang berlangsung dan

pemerintahan (birokrasi) yang tengah berkuasa. Sebaliknya, informasi yang ditutup-tutupi dapat menciptakan kondisi sosial dan pemerintah yang bobrok dan korup.

4. Media memiliki potensi yang besar dalam pembentukan karakter dan pekerti bangsa. Media memiliki fungsi pendidikan, disamping sebagai sumber informasi masyarakat. Tetapi sayangnya media di Indonesia dewasa ini terlanjur masuk dipengaruhi ideologi kapitalisme. Sehingga fungsi sosialnya dalam mengembangkan karakter dan pekerti bangsa cenderung kalah oleh fungsi bisnisnya. Dalam dunia pertelevisian usaha mencari rating dikejar melalui tayangan-tayangan kekerasan, pornografi dan mistik yang merusak mental masyarakat. Begitu pula kehadiran koran kuning yang mengeksploitasi kekerasan dan pornografi sangat mengganggu pembentukan karakter dan pekerti bangsa karena dapat menimbulkan efek peniruan. Alhasil, fungsi sosial media sering kalah oleh disfungsinya di tengah masyarakat.
5. Untuk mendorong peran serta media dalam pembentukan karakter dan pekerti bangsa, secara *deontologis* media harus secara mengikuti tata-peraturan yang berlaku dalam media baik dari segi etik maupun hukum. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas media harus diaktifkan. Semangat yang sebaiknya dimiliki kalangan media juga adalah *communitarian ethics* dan *utilitarian ethics* demi kepentingan sebanyak-banyak (*greatest happiness to the greatest*

*number*). Isi media yang mengganggu kepentingan orang banyak, hanya mengejar keuntungan belaka, apalagi merusak keperiabdian dan watak bangsa seperti kekerasan, pornografi, dan mistik harus dihentikan..

### **IV.3 Saran**

Atas dasar hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan:

1. Untuk kalangan media, sebaiknya mereka bijaksana dalam menyampaikan isi media kepada khalayak. Harus ada kesadaran yang bersifat tanggung jawab sosial bahwa isi medianya tidak akan merusak kesehatan moral masyarakat (karakter dan kepribadian bangsa). Sebaiknya media tidak hanya mengejar untung (profit) dalam membuat tayangan dan atau pemberitaan.
2. Untuk kalangan pengusaha (pengiklan) sebaiknya mereka tidak memasang iklan pada media yang program acara atau pemberitaanya berpotensi merusak kesehatan moral masyarakat (karakter dan kepribadian bangsa) sekalipun acara itu memiliki rating yang tinggi.
3. Untuk masyarakat, sebaiknya meningkatkan melek medianya, dalam arti kritis terhadap isi dan atau program acara yang ditawarkan media. Harus ada keinginan dan kemampuan untuk tidak mengonsumsi media yang isi dan atau program acara bakal merusak kesehatan moral masyarakat (karakter dan kepribadian bangsa). (\*).

## Daftar Pustaka

Baran, Stanley J dan Dennis K. Davis, *Mass Communication Theory*, Wadsworth, 2000.

McQuail, Denis, *Mass Communication Theory, An Introduction* (second edition). Sage Publication, 1987.

Merril, John C., Journalism Ethics, *Philosophical Foundations for New Media*, St Martins Press, 1997

Wright, Charles R, *Mass Communication A Sociological Perspective*, (third edition), McGraw Hill, 1986.

Perpustakaan  
Jenderal K

37  
IB  
P